

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI INDIKATOR PEMBANGUNAN  
EKONOMI ISLAM STUDI KASUS PADA MASYARAKAT  
BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh:**

**OKTA ADIONI TINOKAE RAHMA SUCI  
NPM. 2003011080**



**Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas S1 Perbankan dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H / 2024 M**

**IMPLEMENTASI INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM  
STUDI KASUS PADA MASYARAKAT BUMI NABUNG  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E. )

Oleh:

Okta Adioni Tinokae Rahma Suci  
NPM 2003011080

Pembimbing: Yudhistira Ardana, M.E.K.

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Perbankan dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H / 2024 M**



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

### NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan skripsi untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka, Skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : Okta Adioni Tinokae Rahma Suci  
NPM : 2003011080  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : IMPLEMENTASI INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM STUDI KASUS PADA MASYARAKAT BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Metro, 21 Mei 2024  
Dosen Pembimbing

Yudhistira Ardana, M.E.K  
NIP. 198906022020121011

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI  
ISLAM STUDI KASUS PADA MASYARAKAT BUMI NABUNG  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nama : Okta Adioni Tinokae Rahma Suci

NPM : 2003011080

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

### MENYETUJUI

Untuk di munaqosyah kan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 21 Mei 2024  
Dosen Pembimbing

  
Yudhistira Ardana, M.E.K  
NIP. 198906022020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 0-2888/11-28-3/D/PP-00-9/10/2024

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM STUDI KASUS PADA MASYARAKAT BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, disusun oleh: Okta Adioni Tinokae Rahma Suci, NPM: 2003011080, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/17 Oktober 2024.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Yudhistira Ardana, M.E.K  
Penguji I : Suci Hayati, M.S.I  
Penguji II : Diana Ambarwati, M.E.Sy  
Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Maf'udil M. Hum**  
NIP: 19620812 199803 1 001

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM STUDI KASUS PADA MASYARAKAT BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh:**

**Okta Adioni Tinokae Rahma Suci  
NPM 2003011080**

Pembangunan ekonomi Islam merupakan upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang meliputi keadilan, keberkahan, keadilan sosial, dan distribusi pendapatan yang merata. Menurut Rehman dan Askari, indeks untuk mengukur keIslaman ekonomi memiliki 3 indikator yaitu indeks pencapaian dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja, serta adopsi praktik ekonomi dan keuangan Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan analisis menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bumi Nabung Baru mengimplemetasikan indikator pertama, keadilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan hanya terimplementasi dua (2) aspek, yaitu: aspek lingkungan yang dipertahankan dan aspek partisipasi masyarakat. Indikator kedua, kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja sudah terimplementasi aspek pertama, yaitu kesejahteraan. Adapun indikator yang belum terimplementasi di Kecamatan Bumi Nabung adalah indikator pertama, keadilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan masih belum terlaksana dua (2) aspek, yaitu: aspek keadilan sosial dan ekonomi serta aspek kualitas hidup yang meningkat. Indikator kedua, kesejahteraan dan penciptaan kerja belum telaksana aspek kedua, yaitu: penciptaan lapangan kerja. Dan indikator ketiga, praktik ekonomi dan keuangan Islam belum terimplementasi di Kecamatan Bumi Nabung.

**Kata Kunci:** Pembangunan Ekonomi Islam, field research, Indeks Keislaman Ekonomi

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Okta Adioni Tinokae Rahma Suci

NPM : 2003011080

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 17 Oktober 2024  
Yang Menyatakan,



Okta Adioni Tinokae RS  
NPM. 2003011080

## MOTTO

﴿وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ۖ﴾ ٦١

Artinya: “dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).” (Q.S Hud: 61)



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Ibu saya tercinta ibu Samini yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moral dan materil serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tidak terbatas. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* selalu mencurahkan kasih sayang kepada mereka.
2. Kakak-kakak saya tercinta M. Adi Junaedi, Yuni Pantiani, Agus Trioni Nawa dan Siti Nur Puji Rahayu.
3. Bapak Yudhistira Ardana, M.E.K. selaku pembimbing akademik saya yang selalu membimbing hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Yudhistira Ardana, M.E.K. sebagai ketua jurusan Ekonomi Syariah.
5. Sahabat terkasih saya Amel, Laila, Yulia, dan Revi yang tidak lelah selalu memberikan dukungan kepada saya.
6. Almamater IAIN Metro tempatku menggali ilmu dan mempertajam intelektual yang saya banggakan.

Semoga orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan *inayah*-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Pembangunan Ekonomi Islam Studi Kasus Pada Kecamatan Bumi Nabung*”.

Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1).

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA. selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro;
3. Ibu Dr. Putri Swastika, M.IF. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang sangat berharga.;
4. Ibu Yuyun Yunarti, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro;
5. Bapak Liberty, S.E.,M.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro;
6. Bapak Yudistira Ardana, M.E.K. selaku Ketua Jurusan S1 Ekonomi Syariah;
7. Bapak Yudistira Ardana, M.E.K. selaku pembimbing skripsi yang selalu sabar memberi pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai;
8. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan penelitian skripsi ini.

9. Bapak Rayendra selaku camat di Kecamatan Bumi Nabung.
10. Bapak Rudi Ismaini, S.IP. selaku kasi tata pemerintahan dan informan dari Kecamatan Bumi Nabung.
11. Para narasumber yang telah membantu saya dalam pengumpulan data.
12. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini dapat dibalas oleh Allah AWT, peneliti sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. Peneliti harapkan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amiin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 17 Oktober 2024  
Peneliti,



**Okta Adioni Tinokae Rahma Suci**  
NPM. 2003011080

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Tentang Pembangunan Ekonomi .....	10
1. Pengertian Pembangunan Ekonomi .....	10
2. Tujuan Pembangunan Ekonomi .....	13
3. Manfaat Pembangunan Ekonomi.....	14
B. Konsep Pembangunan Ekonomi .....	14
1. Tauhid .....	15
2. Keadilan .....	15
3. Kesejahteraan.....	15
4. Larangan Riba.....	16
5. Zakat dan Shadaqoh.....	16

6. Keseimbangan Antara Konsumsi dan Produksi.....	16
7. Peran Negara.....	17
C. Indikator Pembanguna Ekonomi.....	17
1. Pengantar Indikator Pembangunan Ekonomi .....	17
2. Indikator Pembangunan Ekonomi Konvensional .....	19
3. Indikator Pembangunan Ekonomi Islam.....	26

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	34
B. Sumber Data.....	35
1. Sumber Data Primer.....	35
2. Sumber Data Sekunder .....	36
3. Sempling .....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Wawancara.....	37
2. Observasi .....	37
3. Dokumentasi .....	38
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data.....	39

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Profil Kecamatan Bumi Nabung.....	41
B. Deskripsi Tentang Pembangunan Ekonomi Islam Kecamatan Bumi Nabung.....	43
1. Deskripsi Tentang Indeks Pencapaian Keadilan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan.....	43
2. Deskripsi Tentang Kesejahteraan dan Penciptaan Lapangan Kerja.....	58
3. Deskripsi Tentang Adopsi Praktik Ekonomi dan Keuangan Islam.....	66
C. Hambatan dan Tantangan dalam Mengukur Indikator Pembangunan Ekonomi Islam pada Masyarakat Pedesaan .....	69

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

#### Halaman

1. Penelitian Relevan..... 7
2. Jumlah Penduduk ..... 43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Foto Kegiatan Penelitian
2. Surat Bimbingan Skripsi
3. Alat Pengumpul Data
4. Outline
5. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Surat Izin Research
7. Balasan Surat Izin Research
8. Surat Tugas
9. Kartu Bebas Pustaka
10. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
11. Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan populasi yang besar dan keberagaman budaya, Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan jumlah penduduk dengan ibu kota negara di Jakarta.<sup>1</sup> Per September 2021, ekonomi Indonesia terus pulih dari dampak pandemi COVID-19, namun tantangan tetap ada. Pada kuartal II 2021, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 7,07% secara tahunan, menunjukkan pemulihan dari kontraksi pada tahun sebelumnya. Perkonomian Indonesia merupakan campuran dari sektor pertanian; industri; jasa; investasi dan infrastruktur.<sup>2</sup>

Sektor pertanian menyumbang sebagian besar Produk Domestik Bruto (PDB). Pertanian tetap menjadi sumber utama mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan merupakan komponen penting dalam sektor pertanian.

Kemudian ada sektor industri di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama dalam bidang manufaktur. Produk manufaktur melibatkan berbagai industri seperti tekstil, otomotif, dan elektronik. Industrialisasi menjadi fokus untuk meningkatkan tambahan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Chesnokova Svetlana, "Transport In Indonesia: Recent Developemnt Trends," *Eastern analytics* 4 (2021): 62–73.

<sup>2</sup> Ismail, Hasang dan Muhammad Nur, *Perekonomian Indonesia* (Ahlimedia Book, 2020).

Selain itu, sektor jasa di Indonesia semakin berkembang yang mana mencakup perdagangan, keuangan, pariwisata, dan teknologi informasi. Kota-kota besar seperti Jakarta menjadi pusat kegiatan ekonomi dan keuangan.

Investasi dan Infrastruktur, pemerintah Indonesia aktif mendorong investasi asing dan domestik untuk mendukung pembangunan ekonomi. Program pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi dan energi, juga menjadi fokus untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing. Meskipun terdapat pencapaian signifikan, tantangan seperti kesenjangan regional, ketidaksetaraan, dan pengelolaan sumber daya alam tetap menjadi fokus untuk diperhatikan dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Provinsi Lampung adalah sebuah provinsi di Pulau Sumatra, Indonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Bandar Lampung. Lampung memiliki keanekaragaman geografis, termasuk pegunungan, dataran rendah, serta pantai yang panjang yang menjadi potensi perkembangan ekonomi di Lampung.

Perekonomian Lampung memiliki ciri khas, *pertama*, pertanian dan perkebunan. Lampung terkenal dengan sektor pertanian dan perkebunannya yang subur. Produksi kelapa sawit, kopi, karet, dan berbagai komoditas pertanian lainnya berperan penting dalam perekonomian daerah ini. *Kedua*, sektor industri di Lampung juga mengalami perkembangan, terutama dalam pengolahan hasil pertanian. Pabrik kelapa sawit dan pabrik kopi menjadi elemen penting dalam mendukung ekonomi daerah. *Ketiga*, pariwisata

Lampung memiliki potensi pariwisata yang signifikan dengan pantai-pantai yang indah, taman nasional, dan budaya yang kaya. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. *Keempat*, upaya pembangunan infrastruktur, termasuk jaringan transportasi dan energi juga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Lampung dengan meningkatkan konektivitas dan dukungan investasi

Pembangunan merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan dasar, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup secara umum. Pembangunan mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.<sup>3</sup> Di lain sisi, ekonomi islam adalah cabang dari ilmu ekonomi yang berfokus pada prinsip-prinsip ekonomi yang ditentukan dalam ajaran islam. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti distribusi kekayaan yang adil, larangan riba, peran zakat, infaq, dan sadaqah dalam mendistribusikan kekayaan yang berlandaskan nilai-nilai islam.<sup>4</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi islam mengacu pada upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi islam yang meliputi keadilan, keberkahan, keadilan sosial, dan distribusi pendapatan yang merata.

---

<sup>3</sup> Michael P. Tadora dan Stephen Smith, *Economic Development*, 12 ed. (Harlow, Inggris: Pearson Education, 2015).

<sup>4</sup> Chapra Umer, *The Future Of Economics: An Islamic Perspective* (Jakarta: Syari'ah Economics And Banking Institute, 2001).

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Adapun tujuan dan manfaat dari pembangunan ekonomi ialah sebagai berikut: meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Manfaat dari pembangunan ekonomi ialah kekayaan masyarakat bertambah, memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

Suatu daerah dapat dikatakan maju apabila telah mencapai beberapa indikator. Indikator pembangunan dalam ekonomi islam mencakup ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan dan kemajuan ekonomi masyarakat berlandaskan prinsip ekonomi islam. Berikut merupakan indeks pembangunan pencapaian keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja, dan adopsi praktik ekonomi dan keuangan islam.

Berbicara tentang pembangunan ekonomi Provinsi Lampung, terdapat satu kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang cukup menarik untuk menjadi fokus peneliti, yaitu kecamatan Bumi Nabung. Bumi Nabung merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Tengah. Kecamatan Bumi Nabung memiliki luas wilayah 3.802 km<sup>2</sup>. Kecamatan ini memiliki 7 (tujuh) Desa yang dihuni oleh 18.000 jiwa. Ketujuh desa tersebut yaitu Desa Bumi Nabung Baru, Desa Bumi Nabung Ilir, Desa

Bumi Nabung Selatan, Desa Bumi Nabung Timur, Desa Bumi Nabung Utara, Desa Sri Kenanga, dan Desa Sri Kencono.

Masyarakat Bumi Nabung menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, serta tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Di sisi lain, masyarakat Bumi Nabung memiliki potensi besar dalam sector pertanian, perdagangan, dan kewirausahaan, yang jika dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam dapat mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, penerapan indikator ekonomi islam dalam masyarakat Bumi Nabung masih belum optimal. Indikator seperti indeks pencapaian keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja, serta adopsi praktik ekonomi dan keuangan islam menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan yang holistic. Kurangnya pemahaman dan praktik implementasi ekonomi islam menjadi salah satu kendala yang perlu diatasi agar masyarakat mampu merasakan manfaat pembangunan secara lebih merata.

Berdasarkan hasil prasurvei dan wawancara oleh beberapa masyarakat, sebagian masyarakat mengatakan jika kesejahteraan dan lapangan kerja cukup sulit di Kecamatan Bumi Nabung hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang merantau keluar negeri atau luar daerah untuk mencari

pekerjaan.<sup>5</sup> Kemudian sebagian masyarakat Bumi Nabung sering melakukan pinjaman uang dari rentenir atau bank non formal dengan bunga yang tinggi<sup>6</sup>, hal-hal ini bertentangan dengan indikator-indikator dalam pembangunan ekonomi Islam.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Implementasi Indikator Pembangunan Ekonomi Islam Pada Masyarakat Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah” dengan tujuan untuk menganalisis implementasi indikator pembangunan ekonomi islam pada masyarakat Bumi Nabung. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai sejauh mana indikator-indikator ekonomi islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatan penerapannya.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan masyarakat untuk mengembangkan strategi pembangunan ekonomi berbasis islam yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam memahami relevansi dan efektivitas penerapan ekonomi islam pada masyarakat pedesaan serta mendukung prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diamanatkan oleh syariah.

---

<sup>5</sup> Rudi Ismaini, Kasi Pemerintahan Kecamatan Bumi Nabung, Wawancara, 19 Februari 2024.

<sup>6</sup> Samini, Masyarakat Bumi Nabung Baru, Wawancara, 18 Februari 2024.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, muncullah pertanyaan penelitian yaitu apakah masyarakat Bumi Nabung mengimplementasikan indikator pembangunan ekonomi islam dengan baik?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis indikator-indikator yang mempengaruhi pembangunan ekonomi islam pada masyarakat Bumi Nabung.

Sedangkan manfaat penelitian dari penelitian ini adalah:

### **1. Secara Teoritis**

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam pembangunan daerah, khususnya mengetahui tentang indikator-indikator pembangunan ekonomi dalam islam.

### **2. Secara Praktis**

Memberikan manfaat berupa dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah atau instansi terkait pembangunan ekonomi dalam islam.

## **D. Penelitian Relevan**

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan atau relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lina Tariyah, Ahmad Faqih, dan Retnawati Siregar.

**Tabel 1.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lina Tariyah / 2020	Analisis Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pembangunan Ekonomi Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Di Kabupaten Lampung Timur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi karena nilai probabilitas sebesar 0,000000	Faktor Sumber Daya Alam dan Faktor Sumber Daya Manusia	Metode penelitian dan teori yang digunakan
2.	Ahmad Faqih / 2017	Analisis Pemikiran The Kian Wei Tentang Pembangunan Ekonomi Dalam Prespektif Ekonomi Islam	Pandangan ekonomi Islam terhadap pembangunan ekonomi melaksanakan pembangunan seutuhnya yang menyangkut keselarasan dan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan. Upaya pembangunan dianggap berhasil apabila keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat	Prinsip Pembangunan Ekonomi Islam, Dasar Hukum Pembangunan Ekonomi Islam, dan Faktor-Faktor Pembangunan Ekonomi.	Metode penelitian
3.	Retnawati Siregar dan M. Shabri Abd. Majid / 2023	Pembangunan Ekonomi Dalam Prespektif	Penelitian ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung	Teori yang digunakan	Metode penelitian



No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Islam	<p>pembangunan ekonomi terangkum dalam ajaran Al-Qur'an, Sunnah, dan para pemikir islam sebelumnya. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kesejahteraan ummat, sumber daya manusia, dan peningkatan harkat martabat manusia.</p>		

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Tentang Pembangunan Ekonomi**

##### **1. Pengertian Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan masyarakat. Menurut Endang, seorang akademisi Indonesia di bidang ekonomi pembangunan, memberikan pandangan bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perubahan sosial, struktural, dan institusional yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Pembangunan ekonomi atau sering pula disebut perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang disertai dengan perubahan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat. Dalam lingkup daerah, pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya–sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja yang baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Menurut M. Hasan dan M. Asiz yang dikutip dari Adisasmita “ Pembangunan

---

<sup>1</sup>Endang Mulyana, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UNY Press, 2017) hal. 1.

ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan insutri alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja yng ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, indentifikasi pasar–pasar baru, dan transformasi pengetahuan”.<sup>2</sup>

Lain halnya dalam sudut pandang ekonomi islam yang menurut Ali Rama yang dikutip dari Rehman dan askari mengatakan bahwa islam menyediakan garis petunjuk (*guidelines*) ekonomi yang detail untuk menciptakan sistem ekonomi yang sukses dan berkeadilan. Tujuan utama islam dalam ekonomi adalah untuk mengembangkan kesejahteraan ekonomi dan kesamaan struktur sosial bagi setiap masyarakat demi memaksimalkan kemampuan intelektual, melestarikan dan mengembangkan kekayaan, dan aktif berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disertai keadilan sosial adalah fondasi dari sistem ekonomi islam.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang tecantum dalam Al-Qur’an surat Hud ayat 61 yang berbunyi:

﴿وَالِىٰ تَمْوَدَٰ أَخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ اَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاَسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ۝۶۱﴾

Artinya: “Dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah)

<sup>2</sup> Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal)* (Makassar: CV. NUR LINA & Pustaka Taman Ilmu, 2018).

<sup>3</sup> Ali Rama, *Kontribusi Indeks Keislaman Ekonomi dan Kajian Empirisnya di Indonesia* (Jakarta: Jurnal Bisnis Islam, 2016).

*dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).”*

Q.S. Hud ayat 61. Mengistilahkan memakmurkan bumi yang dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dapat ditemukan dalam perkataan Ali bin Abi Talib ketika menyampaikan pesan kepada seorang gubernur yang akan ditugaskan di Mesir: Isi pesan tersebut «Hendaklah perhatian kamu terhadap pemakmuran bumi (tanah) lebih besar dari pada perhatian kamu terhadap pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya bisa dioptimalkan dengan memakmurkan bumi (membangun pertanian). Memungut pajak dengan tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, dapat mengakibatkan negara menjadi hancur.

Setelah dijelaskan kisah kaum Nabi Hud dan keingkaran mereka terhadap nabinya serta azab yang ditimpakan kepada mereka, maka ayat berikut ini, menjelaskan tentang kisah kaum Samud. Dan kepada kaum Samud yang mendiami wilayah Hijr antara kota Madinah dengan Tabuk, Kami utus saudara seketurunan mereka, yaitu Nabi Saleh, dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah Tuhan yang Esa, karena tidak ada Tuhan bagimu yang pantas dan layak disembah selain Dia. Dialah Allah yang telah menciptakanmu dari bumi, yakni Nabi Adam yang diciptakan Allah dari tanah, dan menugaskanmu memakmurkannya, karena kamu memang layak untuk mengurus bumi dengan bercocok tanam, membangun rumah, mendirikan bangunan, gedung-gedung tinggi, dan lain sebagainya. Tapi ternyata di antara kamu ada yang melakukan

pelanggaran dengan berbuat kerusakan, seperti eksploitasi hutan maupun hasil bumi secara besar-besaran tanpa menjaga kelestarian dan keseimbangan alam serta lingkungannya. Karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya atas dosa-dosa yang kamu lakukan, kemudian bertobatlah kepada-Nya dengan meninggalkan perbuatan syirik dan dosa, lalu sembahlah Allah. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatNya kepada orang-orang yang taat dan memperkenankan doa hamba-Nya."<sup>4</sup>

## **2. Tujuan Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek kehidupan yang terus-menerus dikembangkan diseluruh dunia. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi menyangkut kesejahteraan masyarakat luas. Tujuan utama dalam pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran seluruh masyarakat dalam suatu daerah secara merata.

Selain itu, tujuan pembangunan juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

### **a. Tujuan jangka pendek**

Tujuan pembangunan jangka pendek adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat yang adil, merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

---

<sup>4</sup> Nuonline, <https://quran.nu.or.id/hud/61> . 10 Juli 2024

b. Tujuan jangka panjang

Tujuan pembangunan dalam jangka panjang adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual.

**3. Manfaat Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi pada suatu daerah memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat maupun daerah. Beberapa manfaat terjadinya pembangunan ekonomi antara lain sebagai berikut:

- a. Kekayaan dari output suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah.
- b. Memberikan kesempatan kepada manusia yang lebih besar untuk mengoptimalkan manfaat dari sumber daya yang ada.
- c. Pembangunan ekonomi dapat menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas.
- d. Terjadinya pembangunan ekonomi, akan tersedia lebih banyak jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- e. Pembangunan ekonomi akan mengurangi jurang perbedaan antara daerah yang sedang berkembang dengan daerah yang sudah maju.

**B. Konsep Pembangunan Ekonomi Islam**

Konsep pembangunan ekonomi islam menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan ekonomi. Konsep ini berbeda dengan pembangunan ekonomi konvensional yang sering kali hanya berfokus pada aspek material dan pertumbuhan ekonomi tanpa

memperhatikan nilai-nilai moral dan etika.<sup>5</sup> Terdapat tujuh prinsip-prinsip utama dalam pembangunan ekonomi islam<sup>6</sup>, yaitu:

### **1. Tauhid**

Tauhid, atau kepercayaan kepada keesaan Allah, menjadi landasan utama pembangunan ekonomi Islam. Setiap kegiatan ekonomi harus didasarkan pada niat untuk beribadah dan mendapatkan ridha Allah. Ini mempengaruhi cara seorang Muslim melakukan transaksi, memandang harta, serta berinteraksi dengan sesama manusia dalam urusan ekonomi.<sup>7</sup>

### **2. Keadilan**

Keadilan dalam Islam meliputi distribusi kekayaan yang adil dan merata di antara anggota masyarakat. Hal ini mengharuskan adanya mekanisme distribusi yang menghindari ketimpangan yang terlalu lebar antara si kaya dan si miskin, seperti zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Sistem bunga yang diterapkan dalam ekonomi konvensional tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam karena dianggap eksploitatif.<sup>8</sup>

### **3. Kesejahteraan**

Setiap kebijakan atau tindakan ekonomi dalam Islam harus bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Ini berarti, pembangunan ekonomi Islam menekankan pada upaya mencapai kemakmuran yang bersifat komunal dan kolektif, bukan hanya keuntungan individu atau

---

<sup>5</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking* (Leicester, Inggris.: Islamic Foundation, 1981), hal 38-40.

<sup>6</sup> M. Umer Chapra, *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*, 21 vol. (UK: Kube Publishing Ltd, 2016), hal 130-133.

<sup>7</sup> Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester, Inggris.: The Islamic Foundation, 1992), hal 15-17.

<sup>8</sup> Umer Chapra, hal 209-212.

kelompok tertentu. Kebijakan ekonomi yang diambil haruslah mempertimbangkan kesejahteraan bagi banyak orang, bukan hanya keuntungan segelintir pihak.<sup>9</sup>

#### **4. Larangan Riba**

Riba dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai tindakan yang menzalimi dan memanfaatkan orang lain. Dalam ekonomi Islam, sistem keuangan berbasis bunga digantikan dengan sistem bagi hasil (profit-sharing) yang lebih adil dan seimbang antara pihak pemodal dan pengusaha. Konsep ini tercermin dalam lembaga keuangan Islam seperti perbankan syariah.<sup>10</sup>

#### **5. Zakat dan Shadaqoh**

Salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam adalah sistem zakat, di mana setiap Muslim yang memiliki harta di atas nisab wajib mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai cara untuk membersihkan harta dan mencegah penumpukan kekayaan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sedekah juga dianjurkan untuk meningkatkan solidaritas sosial.<sup>11</sup>

#### **6. Keseimbangan Antara Konsumsi dan Produksi**

Islam menganjurkan konsumsi yang moderat dan tidak berlebihan. Pemborosan dan perilaku konsumtif yang tidak terkendali dilarang karena dianggap sebagai perilaku yang tidak mencerminkan sikap syukur

---

<sup>9</sup> Umer Chapra, hal 214-217.

<sup>10</sup> Umer Chapra, hal 243-247.

<sup>11</sup> Umer Chapra, hal 218-222.



kepada Allah. Di sisi lain, produksi juga harus memperhatikan keseimbangan dengan lingkungan, dan tidak boleh merusak alam atau mengakibatkan kerusakan pada generasi mendatang.<sup>12</sup>

## **7. Peran Negara**

Dalam ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin terlaksananya keadilan ekonomi. Negara harus mengawasi jalannya distribusi kekayaan, memastikan tidak ada praktik ekonomi yang eksploitatif, dan menegakkan hukum zakat serta aturan syariah lainnya yang terkait dengan ekonomi.<sup>13</sup>

Dalam praktiknya, pembangunan ekonomi Islam dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan sektor industri halal. Misalnya, sistem perbankan syariah yang berkembang saat ini beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, mudharabah (kemitraan), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). Pasar modal syariah juga memungkinkan investasi di saham-saham yang halal menurut syariah Islam, yang artinya perusahaan-perusahaan yang tidak terlibat dalam aktivitas yang dilarang seperti produksi alkohol atau perjudian.

## **C. Indikator Pembangunan Ekonomi**

### **1. Pengantar Indikator Pembangunan Ekonomi**

Indikator merupakan alat untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah. Manfaat utama dari indikator tersebut adalah agar dapat digunakan untuk membandingkan tingkat

---

<sup>12</sup> Umer Chapra, hal 230-234.

<sup>13</sup> M. Umer Chapra, *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*, hal 160-165.

kemajuan pembangunan atau tingkat kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui corak pembangunan setiap daerah.<sup>14</sup>

Pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup pertumbuhan output atau produk domestik bruto (PDB), tetapi juga melibatkan aspek-aspek kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan distribusi sumber daya. Oleh karena itu, dalam mengukur kemajuan pembangunan ekonomi, kita tidak hanya bergantung pada indikator kuantitatif seperti pendapatan per kapita, tetapi juga memperhitungkan indikator kualitatif seperti kesehatan, pendidikan, kemiskinan, ketimpangan, dan lingkungan hidup.<sup>15</sup>

Indikator pembangunan ekonomi memainkan peran penting dalam membantu memahami kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara. Penggunaan berbagai indikator, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan masyarakat. Meskipun indikator seperti PDB (Produk Domestik Bruto) dan pendapatan per kapita masih dominan, indikator-indikator yang lebih holistik seperti IPM (Indek Pertumbuhan Masyarakat) dan indeks kemiskinan semakin digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

---

<sup>14</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan* (Jakarta: Erlangga, 2013), hal 68-70.

<sup>15</sup> Todaro, M. P. dan Smith, S. C, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, 10 Terjemahan (Jakarta: Erlangga, 2009), hal 16-21.

## 2. Indikator Pembangunan Ekonomi Konvensional

Indeks Pembangunan Ekonomi Konvensional merujuk pada ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan ekonomi suatu negara dengan fokus pada aspek-aspek kuantitatif. Indeks ini sering kali mencakup indikator-indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan per kapita, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pendekatan konvensional ini cenderung menekankan pada pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur utama keberhasilan pembangunan, dengan mengabaikan dimensi non-ekonomi seperti kesejahteraan sosial, distribusi kekayaan, dan faktor-faktor lingkungan.<sup>16</sup>

Dalam pembangunan ekonomi konvensional terdapat beberapa indikator penting didalamnya, diantaranya yaitu:

### a. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah ukuran ekonomi yang digunakan untuk mengetahui rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu di suatu negara dalam satu periode tertentu, biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi total pendapatan atau produk domestik bruto (PDB) suatu negara dengan jumlah penduduknya. Ini adalah salah satu indikator penting untuk menilai kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara dan standar hidupnya. Rumus pendapatan per kapita ialah dengan membagi BDP (Produk Domestik Bruto) dengan jumlah penduduk. PDB (Produk

---

<sup>16</sup> Todaro, M. P. dan Smith, S. C, hal 16-21.

Domestik Bruto) adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Dan total jumlah penduduk adalah total populasi negara tersebut pada periode yang sama.<sup>17</sup> Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin baik standar hidup yang diharapkan.

Meskipun sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi, pendapatan per kapita memiliki beberapa keterbatasan<sup>18</sup>, diantaranya yaitu:

1) Tidak Mencerminkan Distribusi Kekayaan

Pendapatan per kapita hanya menunjukkan rata-rata pendapatan, tanpa memperhitungkan distribusi kekayaan di dalam suatu negara. Sebuah negara mungkin memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi jika kekayaan tersebut terkonsentrasi di tangan segelintir orang, maka sebagian besar penduduk mungkin masih hidup dalam kemiskinan.

2) Tidak Memperhitungkan Nilai Non-Material

Pendapatan per kapita hanya mengukur aspek material dari kesejahteraan ekonomi dan tidak memperhitungkan faktor lain seperti kebahagiaan, kesehatan, atau pendidikan.

3) Tidak Memperhitungkan perbedaan Biaya Hidup

Daerah dengan pendapatan per kapita yang sama mungkin memiliki biaya hidup yang sangat berbeda. Misalnya, 3.000.000

---

<sup>17</sup> Michael P. Tadora dan Stephen Smith, *Economic Development*, hal 49-51.

<sup>18</sup> Michael P. Tadora dan Stephen Smith, hal 51-52.

per kapita di satu daerah mungkin menyediakan standar hidup yang jauh lebih baik daripada daerah lain dengan biaya hidup yang jauh lebih tinggi.

#### 4) Tidak Memperhitungkan Kerusakan Lingkungan

PDB (Produk Domestik Bruto) dan pendapatan per kapita tidak memperhitungkan kerusakan lingkungan atau penurunan kualitas sumber daya alam. Peningkatan PDB bisa disertai dengan penurunan kualitas lingkungan hidup, yang dalam jangka panjang mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, pendapatan per kapita sering digunakan bersama dengan indikator lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kemajuan suatu negara. Peningkatan pendapatan per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang baik, tetapi para ekonom juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kualitas pertumbuhan tersebut dan distribusinya.<sup>19</sup>

Pendapatan per kapita merupakan indikator penting untuk memahami kesejahteraan ekonomi suatu daerah. Ini memberikan gambaran umum tentang kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh

---

<sup>19</sup> Michael P. Tadora dan Stephen Smith, hal 56-58.

penduduknya. Namun, karena keterbatasannya dalam mencerminkan distribusi kekayaan dan kualitas hidup secara lebih mendalam, pendapatan per kapita sering digunakan bersama dengan indikator lain untuk menilai pembangunan ekonomi secara menyeluruh.

b. Indeks Kualitas Hidup

Indeks Kualitas Hidup atau Quality of Life Index adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai dan membandingkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek, baik material maupun non-material. Berbeda dengan indikator ekonomi konvensional seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita, indeks ini mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia yang lebih luas, seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, hak asasi manusia, keseimbangan pekerjaan-kehidupan, kebahagiaan, keamanan, serta akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi.<sup>20</sup>

Indeks Kualitas Hidup mencakup beberapa komponen penting yang berfungsi untuk menilai tingkat kesejahteraan manusia secara lebih luas, melampaui ukuran ekonomi tradisional seperti PDB. Berikut adalah komponen-komponen utama dari Indeks Kualitas Hidup<sup>21</sup>:

---

<sup>20</sup> Latifa Resmiya dan Ifa H. Misbach, "Pengukuran Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Hidup di Indonesia," *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling* 3, no. 2 (2017): 23–29.

<sup>21</sup> Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi, *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*, 1 ed. (Paris: Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2009, hal 24-29).

- 1) **Kesehatan:** Komponen ini mengukur akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, harapan hidup, dan kualitas pelayanan kesehatan. Akses ke air bersih, gizi yang memadai, dan lingkungan hidup yang sehat juga dipertimbangkan di sini.<sup>22</sup>
- 2) **Pendidikan:** Pendidikan adalah indikator penting yang mencakup tingkat literasi, akses ke pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta kualitas sistem pendidikan. Indeks ini juga memperhitungkan kemampuan akses pendidikan oleh masyarakat luas.<sup>23</sup>
- 3) **Pendapatan atau Standar Hidup:** Komponen ini mengukur pendapatan per kapita atau standar hidup individu yang terkait dengan kekayaan material dan daya beli, yang berkontribusi pada kesejahteraan hidup secara keseluruhan.<sup>24</sup>
- 4) **Lingkungan Hidup:** Faktor ini menilai kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat, termasuk akses terhadap udara bersih, air bersih, dan lingkungan yang sehat. Kerusakan lingkungan atau polusi yang tinggi dapat menurunkan kualitas hidup secara signifikan.<sup>25</sup>
- 5) **Keseimbangan Kehidupan Kerja-Pribadi (Work-Life Balance):** Komponen ini mengukur seberapa seimbang waktu

---

<sup>22</sup> N F M Nofitri, "Gambaran Kualitas Hidup Penduduk Dewasa pada Lima Wilayah di Jakarta" (Jakarta, Universitas Indonesia, 2009), hal 9-19.

<sup>23</sup> Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi, *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*, hal 30-32.

<sup>24</sup> Michael P. Tadora dan Stephen Smith, *Economic Development*, hal 80-84.

<sup>25</sup> Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi, *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*, hal 36-38.

yang dihabiskan untuk bekerja dan waktu untuk kehidupan pribadi, termasuk waktu istirahat dan rekreasi. Hal ini penting dalam menentukan kualitas hidup seseorang.<sup>26</sup>

6) **Keamanan:** Keamanan mencakup perlindungan individu dari kejahatan, ketidakamanan politik, atau konflik. Masyarakat yang hidup dalam rasa aman akan memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi.<sup>27</sup>

7) **Kebahagiaan dan Kesejahteraan Psikologis:** Ini adalah komponen yang lebih subjektif yang menilai kebahagiaan individu dan kesejahteraan mental. Survei dan indeks kebahagiaan sering digunakan untuk mengukur komponen ini.<sup>28</sup>

c. **Indek Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau dalam bahasa Inggris disebut *Human Development Index (HDI)*, adalah ukuran untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah mengukur pencapaian pembangunan dibidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita

---

<sup>26</sup> Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi, hal 38-40.

<sup>27</sup> Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi, hal 40-42.

<sup>28</sup> Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi, hal 45-47.



sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk layak hidup.<sup>29</sup>

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan.<sup>30</sup> Indikator-indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas:

- 1) **Lamanya Usia Hidup:** Lama hidup atau usia hidup diukur dengan angka hidup waktu lahir (life expectancy at birth). Indonesia tidak memiliki sistem vital registrasi yang baik sehingga usia hidup dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup (live-births) dan rata-rata anak yang masih hidup (still living) per wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan.
- 2) **Pengetahuan:** Pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf (literacy rate) penduduk 10 tahun keatas dan rata-rata lama sekolah (meanyears of schooling). Kedua indikator ini memberikan gambaran tentang akses dan kualitas pendidikan di suatu daerah.
- 3) **Standar Hidup Layak:** Diukur melalui *Gross National Income (GNI) per kapita* yang telah disesuaikan dengan tingkat paritas

---

<sup>29</sup> Haqiqi Rafsanjani, *Islamic Human Development Index Di Indonesia* (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2018), hal 28.

<sup>30</sup> Endang Mulyana, *Ekonomi Pembangunan*, hal 39-40.

daya beli. Ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan untuk hidup layak.

### 3. Indikator Pembangunan Ekonomi Islam

Indikator pembangunan ekonomi Islam merupakan ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan dan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kerangka syariah. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung fokus pada aspek material dan kuantitatif seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita, ekonomi Islam lebih menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta prinsip keadilan, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial.<sup>31</sup>

Dalam pembangunan ekonomi Islam terdapat indeks keislaman ekonomi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai *Economic Islamicity Index*, indeks keislaman ekonomi terbagi menjadi tiga<sup>32</sup>, yaitu:

a. Indeks Pencapaian Keadilan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan

Keadilan adalah penilaian dan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya.<sup>33</sup> Keadilan dalam bahasa Arab *'adl* yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pula pada hakikatnya adalah memperlakukan

---

<sup>31</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Mikro dan Makro* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal 235-240.

<sup>32</sup> A. Jajang w. Mahri dan dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, hal 171.

<sup>33</sup> Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, hal 56-58.

seseorang sesuai haknya atas kewajibannya yang telah dilakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya.<sup>34</sup>

Keadilan ekonomi merujuk pada distribusi yang adil dari kekayaan, kesempatan, dan sumber daya yang adil dalam masyarakat. Hal ini melibatkan bahwa setiap individu memiliki wewenang yang sama terhadap ekonomi, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kultur masyarakat. Keadilan ekonomi juga mencakup upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara kelompok-kelompok yang berbeda dan memastikan bahwa keputusan ekonomi yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan semua pihak, terutama terhadap masyarakat yang paling rentan dan terpinggirkan.

Keadilan ekonomi menurut Stiglitz, “kebijakan yang tidak adil, termasuk ketimpangan distribusi kekayaan, dapat menghancurkan tatanan sosial dan ekonomi”.<sup>35</sup> Dan menurut Sri Edi Swasono “ bahwa keadilan ekonomi harus mencakup pemerataan hasil-hasil pembangunan dan mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat”.<sup>36</sup>

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan peningkatan

---

<sup>34</sup> Afifah Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *TAZKIYA* VI, no. 1 (2017): 3.

<sup>35</sup> Joseph Stiglitz, *The Price of Inequality* (New York, Amerika Serikat: W.W. Norton & Company, 2012), hal 34-37.

<sup>36</sup> Sri Edi Swasono, *Ekonomi Pancasila dan Sosialisme Religius* (Jakarta: LP3ES, 1991), hal 56-60.

produk domestik bruto (PDB) atau produk nasional bruto (PNB). Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>37</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan adalah konsep yang mengacu pada peningkatan kapasitas ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.<sup>38</sup> Aspek-aspek dari pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di antara lain, yaitu:

- 1) Lingkungan yang dipertahankan, pertumbuhan ekonomi memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi dampak negatif terhadap alam, seperti polusi, kerusakan habitat, dan degradasi sumber daya alam.<sup>39</sup>
- 2) Keadilan sosial dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi memperhatikan distribusi yang adil dari manfaat ekonomi, memperkecil kesenjangan ekonomi, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat.<sup>40</sup>
- 3) Kualitas hidup yang meningkat, tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dengan memberikan akses yang lebih

---

<sup>37</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 22.

<sup>38</sup> Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Pemikiran* (Yogyakarta: BPFE, 1998), hal 47.

<sup>39</sup> L. Rahayu dan Suhardjo, "Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15, no. 2 (2012): 88–95.

<sup>40</sup> Aryanti Arfah dan Muhammad Arif, "Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam," *SEIKO: Journal of Management & Business* 4, no. 1 (2021): 566–581.

baik terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan kebutuhan dasar lainnya.<sup>41</sup>

- 4) Partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>42</sup>

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan, sambil mempertahankan stabilitas ekonomi dan sosial.

#### b. Kesejahteraan dan Penciptaan Lapangan Kerja

Kesejahteraan memiliki banyak arti dimana setiap orang pasti memiliki prespektif mengenai apa yang disebut kesejahteraan. Namun pada umumnya kesejahteraan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang dimiliki seseorang. Kesejahteraan non materi adalah kesejahteraan yang tidak berbentuk harta misalnya kesehatan yang dimiliki. Kesejahteraan menurut islam sendiri juga meliputi kesejahteraan dari sisi mataeri dan non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu-satunya indikator

---

<sup>41</sup> Boediono, *Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah dan Prospek Masa Depan* (Jakarta: Kompas, 2005), hal 112-115.

<sup>42</sup> L. Rahayu dan Suhardjo, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 17, no. 3 (2014): 45-48.

kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat yang digunakan dalam tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.<sup>43</sup>

Sadono Sukirno dalam bukunya menjelaskan bahwa kesejahteraan suatu bangsa diukur dari seberapa baik masyarakat dapat mencapai standar hidup yang layak. Ia menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat mendorong kesejahteraan, namun tetap harus disertai dengan pemerataan dan keadilan dalam distribusi pendapatan. Menurutnya, kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh faktor material tetapi juga oleh faktor sosial dan kualitas kehidupan secara keseluruhan.<sup>44</sup>

Kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi yang berhasil tidak hanya diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan yang lebih baik, perawatan kesehatan, rumah yang layak, pangan yang cukup, serta keadilan sosial dan ekonomi bagi setiap lapisan masyarakat. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang setara bagi semua masyarakat untuk mencapai potensi mereka.

Penciptaan lapangan kerja mengacu pada proses atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat suatu daerah. Hal ini penting untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sri Edi Swasono

---

<sup>43</sup> Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R, "Kesejahteraan Dalam Prespetif Islam Pada Karyawan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Teori dan Terapan* 3, no. 5 (2016): 392–93.

<sup>44</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, hal 213-217.

menekankan aspek keadilan dalam penciptaan lapangan kerja. Ia menyatakan bahwa lapangan kerja harus diciptakan dengan cara yang mendukung pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan sosial. Pemerintah dan sektor swasta perlu berkolaborasi untuk memastikan bahwa lapangan kerja yang tercipta memberikan upah yang layak dan kondisi kerja yang manusiawi.<sup>45</sup>

Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu indikator kunci keberhasilan pembangunan ekonomi adalah menciptakan lapangan kerja yang mencukupi bagi angkatan kerja yang ada. Penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Penciptaan lapangan kerja juga memungkinkan inklusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang tepinggirkan dari pasar tenaga kerja.

Dalam pembangunan ekonomi penting untuk memperhatikan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan inklusif dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, peningkatan kesejahteraan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan penciptaan permintaan yang lebih besar atas barang dan jasa, sehingga

---

<sup>45</sup> Sri Edi Swasono, *Ekonomi Pancasila dan Sosialisme Religius*, hal 112-115.

dapat mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih lanjut.

**c. Adopsi Praktik Ekonomi dan Keuangan Islam**

Adopsi praktik ekonomi dan keuangan islam dalam pembangunan ekonomi mengacu pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi islam dal kegiatan ekonomi dan keuangan sebuah daerah atau masyarakat. Beberapa praktik ekonomi dan keuangan islam yang dapat diadopsi dalam pembangunan ekonomi antara lain<sup>46</sup>:

- a. Sistem keuangan berbasis syariah, yaitu menerapkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), spekulasi, dan transaksi yang tidak jelas atau merugikan, hal ini mencakup koperasi syariah dan produk-produk keuangan syariah lainnya.
- b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu dengan memberdayakan masyarakat melalui prinsip-prinsip ekonomi islam seperti zakat, infaq, dan waqaf untuk membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan distribusi kekayaan, dan memperkuat inklusi keuangan.
- c. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial, yaitu dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika bisnis islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Ini termasuk memastikan

---

<sup>46</sup> Antonio, M. S., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 45-50.



keadilan dalam kontrak, menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai islam, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat umum.

Dengan mengadopsi praktik ekonomi dan keuangan islam dalam pembangunan ekonomi, diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian adalah suatu karya ilmiah yang cara penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan jenis dan strategi tertentu agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga peneliti harus cermat dan tepat dalam menentukan metode penelitian yang dilakukan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis sosio-ekonomi. Analisis sosio-ekonomi adalah suatu pendekatan yang memeriksa hubungan antara faktor-faktor sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau kelompok yang mencakup pemahaman tentang kondisi sosial, budaya dan ekonomi.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap situasi atau konteks tertentu untuk menggali kompleksitas dan dinamika kasus yang ada di Kecamatan Bumi Nabung, Lampung Tengah.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.<sup>2</sup> Penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, persepsi dan manusia secara individual maupun kelompok.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi masyarakat Bumi Nabung dalam perspektif islam.

---

<sup>1</sup> Mustopa Marli Batubara, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2011).

<sup>2</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

<sup>3</sup> Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

## B. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini berupa dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama (responden) melalui penelitian, baik melalui wawancara, obesrvasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah peneliti.<sup>4</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat dan aparatur pemerintahan Kecamatan Bumi Nabung. Peneliti secara langsung melakukan observasi atau menyaksikan kejadian-kejadian yang ada di Kecamatan Bumi Nabung secara langsung.

Sumber data primernya diperoleh melalui cara pengambilan sampel. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampli*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian.<sup>5</sup> Berdasarkan pengertian tersebut sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang akan dilakukan oleh 6 orang dari 2 desa yaitu Desa Bumi Nabung Ilir dan Desa Bumi Nabung Baru, yang terdiri 2 masyarakat Desa Bumi Nabung Baru, 2 masyarakat Desa Bumi Nabung Ilir, kasi pemerintahan di Kecamatan Bumi Nabung dan Kepala Desa Bumi Nabung Baru.

---

<sup>4</sup> Muhajirin dan Maya Panorama, *Pendekatan Praktis; Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017).

<sup>5</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, 10 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan penunjang atau pendukung yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.<sup>6</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini seperti buku-buku perkembangan ekonomi dan dokumen-dokumen terkait seperti: dokumen (rekaman atau catatan) hasil wawancara masyarakat, dokumen jumlah penduduk Bumi Nabung, dan dokumen jumlah pendapatan masyarakat.

## 3. Sampling

Sampling adalah cara penelitian yang tidak menyeluruh, dengan kata lain hanya mengambil elemen sampel yang diteliti.<sup>7</sup> Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel dimana peneliti subjek tertentu yang dianggap memiliki informasi yang relevan atau respresentatif untuk tujuan penelitian.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah 6 sampel yang berupa 2 masyarakat Desa Bumi Nabung yang tidak buta huruf, 2 sampel masyarakat Desa Bumi Nabung Ilir yang tidak buta huruf, dan 2 aparatur pemerintahan di Kecamatan Bumi Nabung.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 137-139.

<sup>7</sup> Sugiyono, hal 120-125.

<sup>8</sup> Sugiyono, hal 218-220.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis untuk mendapatkan data dalam penelitian.<sup>9</sup> Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sengan cara:

1. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung tatap muka ataupun tidak. Dalam teknik wawancara ini, peneliti dan subjek penelitian akan melakukan tanya jawab tatap muka secara bebas terpimpin guna memperoleh data penelitian. Bebas terpimpin adalah wawancara sesuai dengan alat pengumpulan data dan dapat mengembangkan pertanyaan.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan untuk menggali informasi tentang kebudayaan, sosial masyarakat, dan pendapatan rata-rata masyarakat di Kecamatan Bumi Nabung.
2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dimana untuk memperkuat data dari wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Disini peneliti akan mengamati sendiri keadaan yang ada di Kecamatan Bumi Nabung, apabila ada perbedaan dengan wawancara maka penelitian ini belum dikatakan valid.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hal 194.

<sup>10</sup> Sugiyono, hal 193-195.

<sup>11</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal 120.

3. Dokumentasi, yaitu proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang berupa tulisan, lisan, gambar atau arkeologis.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari dokumentasi akan berupa sumber-sumber tertulis yaitu catatan jumlah penduduk, pendapatan masyarakat maupun sumber-sumber tertulis lainnya yang dapat digunakan sebagai data pendukung penelitian dan juga gambar atau foto yang dapat memberikan informasi dalam penelitian.

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data digunakan untuk memverifikasi, menguji, atau menjamin bahwa data yang digunakan dalam suatu penelitian adalah valid, akurat, dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang akan digunakan adalah triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber adalah pendekatan yang melibatkan penggunaan beberapa sumber yang berbeda untuk menginformasi atau memvalidasi penelitian.<sup>13</sup> Dalam konteks triangulasi sumber yaitu dengan menganalisis dari satu narasumber ke narasumber lainnya, peneliti mengumpulkan dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan survei, kemudian membandingkan temuan dari sumber tersebut untuk memastikan keakuratan hasil penelitian.

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hal 240-242.

<sup>13</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal 330-332.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan serangkaian metode atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisis, menginterpretasi, dan menyajikan data.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis sosio-ekonomi yang dimaksudkan untuk mengukur dampak program atau kebijakan tertentu pada komunitas tertentu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti perbedaan tingkat pendapatan dan kesempatan ekonomi yang didasarkan pada lokasi geografis atau kelompok demografis tertentu.<sup>15</sup>

Proses analisis data dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengumpulan data, yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan melalui wawancara dan dokumentasi.<sup>16</sup>
2. Reduksi data, yaitu peneliti memilih semua data yaitu berupa data dari rekaman dan coret-coret yang telah dikumpulkan dan membuang yang tak diperlukan.<sup>17</sup>
3. Interpretasi data, yaitu analisis dan pemahaman mendalam terhadap hasil pengumpulan data.<sup>18</sup>
4. Penarikan kesimpulan, yaitu berdasarkan data relevan yang dikumpulkan dan ditampilkan kemudian ditarik satu kesimpulan untuk memperoleh

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hal 241-243.

<sup>15</sup> Suparlan, P, *Kemiskinan di Perkotaan: Suatu Perspektif Antropologi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hal 31.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hal 74.

<sup>17</sup> Miles, M. B. dan Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: Sage, 1994), hal 10-11.

<sup>18</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal 174.

hasil akhir penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada data yang ada bukan data yang dibuat-buat.<sup>19</sup>

Dengan metode ini akan diuraikan tentang analisis pembangunan ekonomi islam pada masyarakat Bumi Nabung.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hal 95.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Kecamatan Bumi Nabung**

Kecamatan Bumi Nabung adalah salah satu wilayah administratif yang berada di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Indonesia. Wilayah ini dikenal dengan latar belakang sejarah yang berkaitan dengan transmigrasi, program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke wilayah-wilayah lain di Indonesia, termasuk Lampung, pada masa setelah kemerdekaan. Tujuan dari transmigrasi ini adalah untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan mengembangkan wilayah-wilayah baru di luar Jawa.

Bumi Nabung memiliki populasi yang terdiri dari berbagai suku, terutama suku Jawa, yang bermigrasi melalui program transmigrasi. Dengan berjalannya waktu, kecamatan ini berkembang dan mengandalkan sektor pertanian sebagai pilar utama ekonominya, di mana tanaman pangan seperti padi, jagung, dan singkong menjadi komoditas penting. Selain pertanian, perkebunan juga memainkan peran utama, terutama dengan keberadaan tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan karet, yang menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat setempat.

Kondisi geografis Bumi Nabung mencakup dataran rendah yang umumnya dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan, dengan iklim tropis yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Bumi Nabung memiliki curah hujan yang cukup, dengan pola hujan yang biasanya

mengikuti musim penghujan dan musim kemarau, karakteristik yang umum di sebagian besar wilayah Sumatra dan memengaruhi pola tanam masyarakat setempat.

Bumi Nabung berbatasan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Lampung Tengah, yang memiliki kondisi serupa dalam hal geografi dan iklim. Kehadiran berbagai sungai kecil atau anak sungai di sekitar wilayah ini mendukung pengairan lahan pertanian. Selain itu, topografi yang relatif datar mendukung aktivitas pertanian dalam skala luas, di mana komoditas utama yang dihasilkan mencakup padi, jagung, singkong, dan hasil perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Lokasi geografis yang strategis memungkinkan Bumi Nabung untuk berpartisipasi dalam distribusi hasil pertanian dan perkebunan ke wilayah-wilayah lain di Lampung maupun provinsi sekitarnya.

### **Berikut merupakan gambar peta Kecamatan Bumi Nabung**

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN BUMI NABUNG  
MAP OF ADMINISTRATION AREA MUNICIPAL AREAS, BUMI NABUNG SUBDISTRICT



Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung Tengah

Bumi Nabung memiliki karakteristik demografis yang menarik dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk. Populasi di Bumi Nabung terdiri dari berbagai kelompok etnis, termasuk suku Lampung asli, Jawa, Sunda, dan beberapa etnis lainnya, yang memberikan keberagaman budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Bahasa yang umum digunakan di masyarakat adalah bahasa Indonesia, namun bahasa Jawa dan bahasa Lampung juga sering terdengar, mencerminkan latar belakang kultural yang beragam.

Dalam hal kepadatan penduduk, Bumi Nabung termasuk wilayah yang kepadatan populasinya cukup merata, berikut tabel jumlah penduduk Kec.

Bumi Nabung pada tahun 2023:

No.	Desa	KK	Penduduk		Agama				
			LK	PR	Islam	Kristen	Kath	Hindu	Budha
1.	Bumi Nabung Ilir	3.989	6.686	6.149	12.764	22	17	4	4
2.	Bumi Nabung Utara	1.187	1.857	1.775	3.544	81	-	6	-
3.	Bumi Nabung Timur	1.700	2.585	2.518	4.721	19	2	366	-
4.	Bumi Nabung Selatan	1.253	1.849	1.810	3.662	35	-	-	-
5.	Bumi Nabung Baru	1.215	1.901	1.806	3.430	25	20	-	-
6.	Sri Kencono	1.411	2.240	2.245	4.441	20	-	9	-

7.	Sri Kencono Baru	414	2.359	2.334	4.661	5	7	-	-
	Jumlah	11.169	19.477	17.011	37.222	207	46	384	4

**Keterangan:**

- Jumlah Penduduk : 37.467 Jiwa
- Jumlah Agama Islam : 37.222 Jiwa
- Jumlah Agama Kristen : 207 Jiwa
- Jumlah Agama Katholik : 46 Jiwa
- Jumlah Agama Hindu : 384 Jiwa
- Jumlah Agama Budha : 4 Jiwa

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kec. Bumi Nabung pada tahun 2023 adalah 37.467 jiwa dengan 11.169 Kepala Keluarga. Desa dengan populasi penduduk paling banyak adalah Desa Bumi Nabung Ilir dengan jumlah penduduk 12.182 jiwa. Masyarakat Bumi Nabung terdiri dari 5 agama, yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bumi Nabung bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh urbanisasi serta program transmigrasi pada masa lalu yang mendorong peningkatan jumlah penduduk dari luar wilayah. Mayoritas penduduk bekerja di sektor agraris karena Bumi Nabung memiliki lahan yang subur untuk komoditas pertanian dan perkebunan, seperti padi, jagung, singkong, dan kelapa sawit.

## **B. Deskripsi Pembangunan Ekonomi Islam Kecamatan Bumi Nabung**

### **1. Deskripsi Tentang Pencapaian Keadilan dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkesinambungan**

Membahas mengenai keadilan dalam Islam memiliki dimensi penting. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan adalah pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara konsisten dan berkelanjutan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan, mengabaikan kebutuhan generasi mendatang, atau meningkatkan ketidaksetaraan sosial.

Berikut pembahasan mengenai indeks keadilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di Kecamatan Bumi Nabung.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa:

#### **a. Lingkungan yang Dipertahankan**

Lingkungan yang dipertahankan adalah keadaan alam atau lingkungan yang dijaga, atau dilestarikan agar berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan masa depan. Hal ini meliputi perlindungan ekosistem, pengurangan polusi, dan keseimbangan biologis<sup>1</sup>.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Bumi Nabung, salah satu kegiatan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan kegiatan gotong royong yang berfungsi untuk pengurangan polusi terutama polusi air.

---

<sup>1</sup> L. Rahayu dan Suhardjo, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan."

Akan tetapi di Desa Bumi Nabung Baru, beberapa masyarakat mengatakan bahwa sudah lama kegiatan menjaga kelestarian lingkungan atau gotong royong tidak berjalan meski sebelumnya sudah ada himbauan. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“...ada dulu himbuan masyarakat untuk gotong royong tetapi sudah lama sekali tidak dilakukan lagi, kemungkinan terakhir gotong royong itu pada masa bupati Mustafa...”<sup>2</sup>

“...tidak ada himbuan dari pemerintah untuk gotong royong...”<sup>3</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya gotong royong di Desa Bumi Nabung Baru pernah menjadi bagian dari kegiatan masyarakat untuk kelestarian lingkungan, namun mengalami kemunduran setelah beberapa waktu. Dalam konteks ini, gotong royong menunjukkan tingginya tanggung jawab masyarakat dalam mengurangi polusi air dari limbah-limbah sampah plastic.

Pernyataan narasumber menyebutkan bahwa gotong royong sudah lama tidak dilakukan, dengan indikasi terakhir adanya upaya tersebut pada masa Bupati Mustafa (yang memerintah Lampung Tengah pada 2016-2018). Terdapat beberapa faktor potensial yang dapat menjelaskan mengapa praktik ini meredup, salah satunya dikarenakan kurangnya dukungan Pemerintah. Setelah masa kepemimpinan Mustafa, mungkin terdapat penurunan inisiatif atau kebijakan untuk memobilisasi kegiatan gotong royong di

---

<sup>2</sup> Darma Ali Sanjaya, Wawancara, 14 Maret 2024, Bumi Nabung Baru.

<sup>3</sup> Samini, Wawancara, Mei 2024, Bumi Nabung Baru.

masyarakat. Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa praktik gotong royong erat kaitannya dengan dukungan kebijakan pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Kehilangan praktik tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam indikator pembangunan ekonomi Islam.

Gotong royong bukan hanya sebuah kebiasaan sosial, tetapi juga didukung dan seringkali diinisiasi oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah memainkan peran penting dalam memberikan arahan dan kebijakan untuk mobilisasi masyarakat, mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat terkait waktu dan jenis kegiatan gotong royong, dan memastikan kontinuitas kegiatan tersebut.

Kurangnya himbauan dari pemerintah menunjukkan defisit dalam komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan tidak adanya himbauan gotong royong dari pemerintah yaitu:

- 1) Pergantian kepemimpinan: Program-program gotong royong mungkin lebih digiatkan oleh pemimpin tertentu, dan ketika pemimpin tersebut tidak lagi menjabat, program tersebut ikut meredup.
- 2) Prioritas kebijakan yang berubah: Pemerintah mungkin fokus pada program-program lain seperti proyek infrastruktur besar yang didanai pemerintah pusat, sehingga mengurangi fokus pada kegiatan partisipatif.

3) Keterbatasan sumber daya Pemerintah: Kurangnya anggaran dan tenaga untuk mengawasi kegiatan-kegiatan berbasis komunitas dapat menjadi hambatan dalam mendorong gotong royong

Lain halnya dengan Desa Bumi Nabung Ilir, sebagian masyarakat menyatakan bahwa masih terdapat kegiatan gotong royong untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan membersihkan limbah plastic untuk mengurangi polusi air. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Paimin:

“...gotong royong di sini cukup rutin dilaksanakan dalam sebulan sekali..”<sup>4</sup>

Gotong royong bulanan menunjukkan adanya kesadaran bersama yang baik, karena kegiatan ini tidak terjadi spontan melainkan terjadwal dan melibatkan perencanaan. Pelaksanaan rutin dalam waktu tertentu (sebulan sekali) mencerminkan upaya untuk mempertahankan kelestarian lingkungan. Gotong royong membantu menyelesaikan masalah umum seperti, pembersihan lingkungan, perbaikan jalan, dan pemeliharaan fasilitas publik. Rekomendasi untuk meningkatkan aktifitas gotong royong adalah dengan kolaborasi dengan pemerintah, pemerintah desa atau kecamatan dapat memberikan dukungan berupa alat untuk meningkatkan partisipasi. Selanjutnya wawancara dengan bapak Rudi Ismaini:

“...ada upaya pemerintah di Bumi Nabung dalam melestarikan lingkungan seperti himbuan untuk gotong royong, mengurangi penggunaan pestisida berlebihan, dan

---

<sup>4</sup> Paimin, Wawancara, 14 Maret 2024, Bumi Nabung Ilir.



himbuan pada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan...”<sup>5</sup>

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa gotong royong tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki infrastruktur tetapi juga penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti: membersihkan saluran air dan area public untuk mencegah banjir serta pemeliharaan ruang hijau dan pengelolaan sampah. Manfaat gotong royong ialah untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya lingkungan bersih dan memperkuat hubungan sosial antar warga, sekaligus membangun tanggung jawab dalam menjaga lingkungan.

Penggunaan pestisida dalam pertanian dapat meningkatkan hasil panen, tetapi penggunaan berlebihan berdampak negatif, seperti: merusak ekosistem, mencemari air tanah dan sungai, yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, serta meningkatkan ketahanan hama terhadap pestisida. Langkah mengurangi penggunaan pestisida berlebihan menunjukkan kesadaran pemerintah akan bahaya jangka panjang dan mendorong praktik pertanian berkelanjutan. Upaya ini juga dapat melibatkan pelatihan bagi petani dalam penggunaan pestisida yang tepat dan promosi pertanian organic atau penggunaan pestisida alami.

---

<sup>5</sup> Rudi Ismaini, Wawancara, Kasi Pemerintahan Bumi Nabung, 14 Maret 2024, Bumi Nabung Ilir.

Himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan mendorong warga untuk lebih disiplin dan berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Kebiasaan membuang sampah sembarangan adalah salah satu penyebab utama masalah lingkungan, seperti: tumpukan sampah yang menyumbat aliran air, menyebabkan banjir saat musim hujan, pencemaran tanah dan air, terutama dari sampah plastik yang sulit terurai, dan ancaman kesehatan akibat bau dan tempat berkembangnya penyakit (misalnya, nyamuk *Aedes* penyebab DBD). Pemerintah dapat mendukung himbauan ini dengan: menyediakan fasilitas pengolahan sampah atau tempat pembuangan sampah yang memadai serta mengadakan kampanye edukasi tentang pentingnya daur ulang dan pemilahan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian dari Nugroho, R., & Wibisono, E. yang menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan program lingkungan, terutama di tingkat desa. Pemimpin yang baru sering kali membawa prioritas kebijakan berbeda, yang bisa menyebabkan penghentian program yang sebelumnya berjalan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan gotong royong untuk lingkungan sering kali berkurang setelah pergantian pemimpin yang tidak melanjutkan kebijakan pendahulunya. Penelitian ini merekomendasikan agar ada

kerangka kerja formal yang menjaga agar program lingkungan tetap berlanjut terlepas dari perubahan kepemimpinan<sup>6</sup>.

b. Keadilan Sosial dan Ekonomi

Keadilan social dan ekonomi adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan dimasyarakat. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti distribusi pendapatan yang adil, kesetaraan sosial, dan perlindungan sosial<sup>7</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat di Kecamatan Bumi Nabung, salah satu kegiatan untuk mencapai keadilan ekonomi dan sosial adalah dengan memberikan bantuan PKH dan sembako. Namun, masyarakat di Kecamatan Bumi Nabung menyatakan bahwa bantuan ekonomi dan sosial ada akan tetapi belum tepat sasaran. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“...di Bumi Nabung Baru banyak bantuan yang tidak merata yang mendapatkan bantuan dari pemerintah merupakan orang-orang yang memiliki hubungan yang erat oleh aparatur desa...”<sup>8</sup>

“...ada bantuan sosial tetapi tidak tepat sasaran...”<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi bantuan ekonomi dan sosial di

---

<sup>6</sup> Nugroho, R. dan Wibisono, E., “Pengaruh Pergantian Kepemimpinan Terhadap Keberlanjutan Program Lingkungan di Desa,” *Jurnal Manajemen Lingkungan* 2, no. 1 (2020): 29–38.

<sup>7</sup> Aryanti Arfah dan Muhammad Arif, “Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam.”

<sup>8</sup> Samini, Wawancara, Mei 2024.

<sup>9</sup> Paimin, Wawancara.

Kecamatan Bumi Nabung Baru masih belum merata. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah aspek kritis terkait tata kelola, keadilan sosial, dan transparansi dalam distribusi bantuan pemerintah di tingkat desa. Di sini, tampak bahwa bantuan lebih sering diterima oleh mereka yang memiliki hubungan erat dengan aparatur desa, daripada mereka yang lebih membutuhkan secara ekonomi.

Distribusi bantuan yang tidak merata seperti ini sering kali disebabkan oleh lemahnya mekanisme tata kelola dan kurangnya transparansi. Tanpa proses seleksi penerima bantuan yang objektif dan transparan, aparatur desa dapat memiliki wewenang penuh untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Jika tidak diawasi, wewenang ini bisa disalahgunakan untuk memberikan keuntungan pada kelompok tertentu. Fenomena ini juga dikenal dengan istilah *clientelism*, di mana hubungan pribadi atau afiliasi politik menggeser prinsip keadilan. Ketidaktransparanan dalam penyaluran bantuan dapat menciptakan kesenjangan yang lebih lebar dalam masyarakat serta menyebabkan ketidakpuasan dan menurunkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa.

Distribusi bantuan yang tidak adil juga dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, karena warga yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak menerima bantuan cenderung tertinggal dari segi kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi. Di samping itu, hal ini

menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata, karena sebagian bantuan yang seharusnya berdampak positif bagi perekonomian desa justru tidak dimanfaatkan secara efektif.

Disamping itu, untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, mekanisme seleksi yang objektif dan berbasis data sangat penting. Seleksi penerima berdasarkan data kesejahteraan, seperti kondisi ekonomi keluarga, jumlah tanggungan, dan status pekerjaan, dapat membantu dalam memastikan distribusi bantuan lebih tepat sasaran.

Distribusi bantuan yang tidak merata di Bumi Nabung Baru menunjukkan perlunya reformasi tata kelola bantuan di tingkat desa. Pemerintah daerah dan desa dapat melakukan pembenahan dengan meningkatkan transparansi dan menerapkan sistem seleksi berbasis kebutuhan, yang diawasi secara independen. Kolaborasi antara sektor pemerintah, akademisi, dan lembaga masyarakat dapat membantu menciptakan distribusi bantuan yang lebih merata, adil, dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri yang menyoroti dampak ketidakmerataan distribusi bantuan terhadap ketimpangan ekonomi di pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika bantuan tidak didistribusikan secara adil, terjadi ketimpangan ekonomi yang signifikan antara warga yang menerima

bantuan dan yang tidak. Mereka yang seharusnya berhak atas bantuan namun tidak menerimanya sering kali tertinggal dalam hal kesejahteraan dan akses terhadap layanan dasar. Selain memperburuk ketimpangan ekonomi, ketidakmerataan distribusi bantuan juga menimbulkan ketidakpuasan sosial dan berpotensi menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan desa. Putri menyarankan agar pemerintah setempat lebih konsisten dalam penyaluran bantuan dengan basis data yang jelas dan objektif<sup>10</sup>.

c. Kualitas Hidup yang Meningkatkan

Kualitas hidup yang meningkat merupakan suatu kondisi dimana masyarakat mengalami peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan yang mencakup kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Bumi Nabung, salah satu aspek kualitas hidup yang meningkat dapat dilihat dari akses kesehatan yang memadai. Akan tetapi, beberapa masyarakat mengatakan bahwa akses kesehatan di Kec. Bumi Nabung masih belum memadai. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“...bisanya kalo ada posiandu di infokan lewat masjid atau mushola tapi sudah lama saya tidak pernah dengar lagi...”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Putri, M, “Distribusi Bantuan dan Dampaknya Terhadap Ketimpangan Ekonomi di Desa” (Jakarta, Universitas Indonesia, 2019), hal 40-55.

<sup>11</sup> Paimin, Wawancara.

“...untuk akses kesehatan di Bumi Nabung lumayan sulit...”<sup>12</sup>

Hasil wawancara ini menunjukkan dua hal utama yang berpengaruh pada layanan kesehatan masyarakat di Bumi Nabung Baru: (1) penurunan informasi posyandu melalui saluran tradisional (masjid atau mushola), dan (2) sulitnya akses layanan kesehatan di wilayah tersebut. Keduanya mencerminkan tantangan yang berdampak pada efektivitas layanan kesehatan di tingkat lokal.

Informasi yang tidak tersampaikan dapat menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan posyandu. Posyandu berperan penting dalam layanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan anak, sehingga hilangnya akses informasi ini berpotensi menurunkan cakupan layanan kesehatan preventif (mencegah sesuatu yang tidak diinginkan). Mengoptimalkan kembali pengumuman melalui masjid atau mushola, serta menambah saluran komunikasi alternatif (seperti grup WhatsApp atau papan pengumuman desa) bisa menjadi solusi agar informasi penting tentang posyandu tetap sampai ke masyarakat.

Daerah pedesaan sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan karena jarak atau infrastruktur jalan yang belum memadai. Jumlah layanan kesehatan juga dapat mempengaruhi akses kesehatan, jika jumlah puskesmas atau klinik terbatas dan jaraknya jauh, masyarakat bisa mengalami kesulitan mengakses

---

<sup>12</sup> Samini, Wawancara, Mei 2024.

layanan medis dasar dan mendesak. Selain fasilitas, jumlah tenaga medis di daerah pedesaan juga sering kali lebih sedikit dibandingkan kebutuhan masyarakat, yang membuat masyarakat harus menunggu lama atau bahkan tidak mendapatkan layanan kesehatan saat dibutuhkan.

Sulitnya akses kesehatan berpotensi memperburuk kesehatan masyarakat, terutama jika posyandu juga tidak berjalan optimal. Dampak negatif ini akan lebih terasa pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia, yang membutuhkan pemantauan kesehatan secara rutin.

Kedua hasil wawancara ini menunjukkan tantangan signifikan dalam upaya perbaikan kesehatan di Bumi Nabung Baru. Meningkatkan kembali metode penyampaian informasi dengan memanfaatkan masjid/mushola secara konsisten, disertai dengan metode komunikasi modern, akan membantu menjamin keberlanjutan akses informasi. Selain itu, peningkatan akses fisik ke fasilitas kesehatan dan pemerataan tenaga medis dapat dilakukan melalui kerjasama Pemerintah daerah dengan pihak terkait untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan merata bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nurhayati, S oleh yang menyoroti kesulitan akses masyarakat pedesaan terhadap layanan kesehatan, yang disebabkan oleh faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur jalan. Dalam penelitian ini, dijelaskan



bahwa keterbatasan jarak dan jumlah fasilitas kesehatan membuat masyarakat harus menempuh perjalanan jauh atau melalui medan yang sulit untuk memperoleh layanan medis. Kondisi ini diperburuk oleh jumlah tenaga medis yang terbatas, sehingga masyarakat sering kali mengalami waktu tunggu yang lama atau bahkan kesulitan mendapatkan layanan ketika diperlukan. Nurhayati merekomendasikan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penyediaan fasilitas kesehatan bergerak atau klinik desa untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan utama<sup>13</sup>.

#### d. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif dan kontribusi individu atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan social, politik, dan ekonomi dalam suatu daerah. Hal ini meliputi berbagai bentuk partisipasi seperti partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan<sup>14</sup>. Salah satu kegiatan partisipasi yang kerap dilakukan oleh masyarakat adalah pelaksanaan kegiatan program-program pembangunan, seperti pembangunan jalan atau pembangunan irigasi. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

---

<sup>13</sup> Nurhayati, S, “Studi Aksesibilitas Layanan Kesehatan di Daerah Pedesaan: Tantangan dan Peluang” (Surabaya, Universitas Erlangga, 2019), hal 44-58.

<sup>14</sup> Boediono, *Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah dan Prospek Masa Depan*, hal 112-115.

“...biasanya kalau ada borongan jalan desa yang mengerjakan itu masyarakat...”<sup>15</sup>

“... pembangunan jalan desa dan irigasi di kerjakan oleh masyarakat desa...”<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan pola partisipasi lokal dalam pembangunan infrastruktur di desa. Model ini dikenal sebagai *pembangunan berbasis masyarakat* atau *swadaya masyarakat*, di mana masyarakat secara langsung terlibat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk tenaga, waktu, maupun sumber daya.

Keterlibatan langsung dalam proyek pembangunan mencerminkan bahwa proyek seperti pembangunan jalan desa dan irigasi sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Ini menunjukkan adanya partisipasi langsung dan keinginan untuk terlibat dalam pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan komunitas. Partisipasi seperti ini sering didorong oleh pemerintah desa sebagai bagian dari program pemberdayaan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga turut membangun infrastruktur yang mereka butuhkan. Terlibatnya masyarakat dalam proyek pembangunan tidak hanya mengurangi biaya proyek tetapi juga membangun rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Dengan cara ini, masyarakat

---

<sup>15</sup> Samini, Wawancara.

<sup>16</sup> Paimin, Wawancara.

cenderung lebih peduli terhadap pemeliharaan jalan dan irigasi yang mereka bangun sendiri.

Ketika masyarakat mengelola dan melaksanakan proyek infrastruktur, mereka lebih dapat menyesuaikan pengerjaan dengan kebutuhan spesifik desa. Selain itu, swakelola memungkinkan penggunaan bahan lokal dan penyesuaian terhadap kondisi geografis desa, sehingga hasil pembangunan lebih berkelanjutan. Pemerintah daerah atau pusat biasanya memberikan dukungan berupa anggaran atau sumber daya tertentu. Bantuan dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan dapat mendorong sistem swakelola ini, di mana masyarakat desa yang memahami kebutuhan lingkungannya sendiri terlibat langsung dalam pengelolaan proyek pembangunan.

Proyek pembangunan seperti ini memberikan peluang kerja bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi pengangguran lokal dalam jangka pendek. Dengan berjalannya proyek-proyek semacam ini, terjadi perputaran ekonomi yang dapat mengangkat kesejahteraan komunitas. Proses pembangunan jalan atau irigasi yang melibatkan komunitas juga meningkatkan solidaritas dan modal sosial dalam masyarakat. Kerja sama dalam pembangunan memperkuat hubungan antarindividu di desa.

Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang melibatkan warga desa dalam pengerjaan proyek jalan dan irigasi memiliki dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat desa. Selain

memberi manfaat langsung dalam bentuk infrastruktur yang dibutuhkan, model ini meningkatkan modal sosial dan memberi kesempatan kerja. Pembangunan berbasis komunitas juga memupuk rasa tanggung jawab, yang berkontribusi pada keberlanjutan infrastruktur jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Suhardjo yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memainkan peran kunci dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur di tingkat desa di Indonesia. Melibatkan masyarakat secara langsung, selain memberikan keuntungan ekonomi dan sosial, juga mendorong keberlanjutan infrastruktur dan memperkuat hubungan sosial antar warga<sup>17</sup>.

Hasil penelitian ini menunjukkan peran penting gotong royong dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi polusi di Kecamatan Bumi Nabung, meskipun pelaksanaannya mengalami kendala di Desa Bumi Nabung Baru. Penurunan gotong royong ini, yang diduga terkait dengan berkurangnya inisiatif dari pemerintah setempat, menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam memberikan dukungan kebijakan dan komunikasi untuk menggerakkan masyarakat.

Dalam konteks teori keadilan, terutama menurut konsep *'adl* dalam Islam, gotong royong dapat dianggap sebagai upaya memenuhi hak-hak lingkungan yang harus dilindungi untuk generasi sekarang dan mendatang.

---

<sup>17</sup> L. Rahayu dan Suhardjo, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan."

Teori keadilan ekonomi menurut Stiglitz dan Sri Edi Swasono juga menekankan perlunya distribusi yang adil terhadap hasil pembangunan, termasuk dalam akses fasilitas lingkungan. Penurunan kegiatan gotong royong di desa tertentu menimbulkan kesenjangan dalam distribusi kualitas lingkungan yang baik, memperlihatkan kebutuhan akan kebijakan yang lebih merata untuk memastikan bahwa semua desa mendapatkan dukungan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Hasil wawancara tentang ketimpangan dalam distribusi bantuan ekonomi di desa juga menunjukkan adanya ketidakadilan dalam tata kelola distribusi sumber daya. Fenomena ini sejalan dengan konsep *clientelism*, yang menghambat prinsip keadilan ekonomi karena distribusi bantuan cenderung berpihak pada mereka yang memiliki kedekatan dengan aparatur desa. Hal ini bertentangan dengan keadilan ekonomi menurut Sri Edi Swasono, yang mendorong pemerataan hasil pembangunan dan pengurangan ketimpangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mencapai keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Gotong royong, distribusi bantuan yang adil, dan akses kesehatan yang memadai dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

## 2. Deskripsi Tentang Kesejahteraan dan Penciptaan Lapangan Kerja

Kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja adalah dua konsep penting dalam pembangunan ekonomi, dengan kesejahteraan sebagai tujuan akhir dan penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu sarana untuk mencapainya. Pemerintah dan sektor swasta berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat<sup>18</sup>.

Berikut pembahasan mengenai indeks keadilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di Kecamatan Bumi Nabung.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa:

### a. Kesejahteraan

Secara umum, kesejahteraan mengacu pada kondisi di mana individu atau kelompok memiliki taraf hidup dan kualitas hidup yang baik. Dalam teori ekonomi, kesejahteraan sering diukur berdasarkan pendapatan, kesehatan, pendidikan, serta akses ke layanan dasar seperti perumahan dan transportasi.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Bumi Nabung, salah satu teori yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah dengan melihat akses layanan dasar berupa perumahan. Akan tetapi di Desa Bumi Nabung Baru, beberapa masyarakat mengatakan bahwa masih terdapat warga yang belum

---

<sup>18</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, hal 22.

memiliki rumah atau kondisi rumah yang tidak layak huni.

Sebagaimana kutipan wawancara dari ibu Samini berikut:

“...masih ada beberapa rumah jelek karena di Bumi Nabung Baru belum ada program bedah rumah selama ini...”<sup>19</sup>

Pernyataan dalam wawancara tersebut menunjukkan bahwa di daerah Bumi Nabung Baru masih ada beberapa rumah yang kondisinya kurang layak. Kalimat ini juga memberi indikasi bahwa, hingga saat ini, belum ada inisiatif pemerintah atau program khusus yang dilakukan untuk memperbaiki atau merenovasi rumah-rumah yang tidak memadai, seperti program bedah rumah yang biasanya bertujuan untuk meningkatkan standar hunian bagi warga berpenghasilan rendah atau rentan.

Rumah tidak layak huni umumnya merujuk pada kondisi bangunan yang memiliki kerusakan struktural atau fasilitas yang minim, sehingga kurang aman atau kurang nyaman untuk ditempati. Contohnya, rumah mungkin memiliki atap bocor, dinding retak, lantai yang rusak, atau sanitasi yang tidak memadai. Penyebab adanya rumah-rumah dalam kondisi kurang layak bisa beragam, termasuk keterbatasan ekonomi warga, terbatasnya akses terhadap layanan publik, atau minimnya intervensi pembangunan dari pihak pemerintah.

Program bedah rumah biasanya dicanangkan pemerintah untuk membantu masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas agar dapat

---

<sup>19</sup> Samini, Wawancara, Mei 2024.

memiliki rumah yang layak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga serta menyediakan lingkungan tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman. Dalam konteks Bumi Nabung Baru, ketidakhadiran program semacam ini dapat menyebabkan warga yang tidak mampu memperbaiki rumah sendiri mengalami keterbatasan yang terus-menerus, baik dari sisi fisik hunian maupun kualitas hidup.

Kurangnya program bedah rumah di suatu daerah dapat menimbulkan kesenjangan antara warga dengan hunian layak dan tidak layak. Hal ini juga dapat memperburuk kemiskinan struktural karena warga yang hidup di rumah tidak layak biasanya menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Bagi pemerintah, memperbaiki kondisi hunian di Bumi Nabung Baru bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Secara keseluruhan, pernyataan ini mencerminkan adanya kebutuhan akan program bantuan perumahan atau bedah rumah di Bumi Nabung Baru untuk memperbaiki kualitas hidup warga yang terdampak.

Lain halnya dengan Desa Bumi Nabung Ilir, sebagian masyarakat menyatakan bahwa masih terdapat kegiatan gotong royong untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan membersihkan



limbah plastic untuk mengurangi polusi air. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Paimin:

“...di Bumi Nabung Ilir ada program bedah rumah sehingga tidak ada rumah yang tidak layak huni...”<sup>20</sup>

Pernyataan dari wawancara ini mengungkapkan bahwa di Bumi Nabung Ilir, seluruh rumah telah dianggap layak huni, berkat adanya program bedah rumah yang telah berjalan di sana. Program ini kemungkinan besar dilakukan oleh pemerintah atau organisasi sosial dengan tujuan memperbaiki kondisi tempat tinggal warga berpenghasilan rendah atau warga yang memiliki rumah dalam kondisi kurang layak.

Di Bumi Nabung Ilir, keberhasilan program bedah rumah tampak signifikan, karena dikatakan bahwa tidak ada lagi rumah yang dikategorikan tidak layak huni. Ini menunjukkan bahwa program tersebut efektif dalam memenuhi kebutuhan dasar hunian warga di sana. Di wilayah yang memiliki program bedah rumah seperti Bumi Nabung Ilir, ketimpangan sosial antara warga dengan kondisi rumah layak dan tidak layak bisa berkurang. Semua warga memiliki kesempatan untuk tinggal di tempat yang aman dan nyaman, yang bisa meningkatkan keharmonisan sosial dan mengurangi ketidaksetaraan di masyarakat. Jika program seperti ini terus berjalan dan didukung oleh Pemerintah, maka daerah-daerah lain dapat mengikuti jejak Bumi Nabung Ilir dalam mewujudkan lingkungan yang lebih layak huni.

---

<sup>20</sup> Paimin, Wawancara.

Secara keseluruhan, pernyataan ini menunjukkan keberhasilan program bedah rumah di Bumi Nabung Ilir sebagai model yang berhasil dalam menyediakan rumah yang layak huni dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi bagi masyarakatnya. Program semacam ini penting untuk dicontoh oleh wilayah lain yang masih memiliki kendala pada kondisi hunian warga.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Kusuma dan Wahyudi yang membahas efektivitas program bedah rumah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan sosial, serta menciptakan kesetaraan dalam akses hunian layak. Studi kasus di beberapa desa menunjukkan bahwa program ini mampu menjadi solusi jangka panjang dalam perbaikan kondisi sosial ekonomi bagi warga berpenghasilan rendah<sup>21</sup>.

b. Penciptaan Lapangan Kerja

Penciptaan lapangan kerja adalah upaya untuk menyediakan kesempatan bekerja bagi individu dalam suatu perekonomian. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan individu tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi<sup>22</sup>. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Bumi Nabung dengan aparatur Kecamatan Bumi Nabung yang menyatakan bahwa belum terdapat program penciptaan lapangan kerja di Bumi Nabung. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

---

<sup>21</sup> Kusuma, H dan Wahyudi, A, "Implementasi Program Bedah Rumah sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial" 5, no. 2 (2019): 102–15.

<sup>22</sup> Sri Edi Swasono, *Ekonomi Pancasila dan Sosialisme Religius*, hal 112-115.

“...belum ada program lapangan pekerjaan sehingga masyarakat kebanyakan hanya bekerja sebagai buruh lepas...”<sup>23</sup>

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa di Bumi Nabung belum ada program yang dikhususkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan formal atau terstruktur. Akibatnya, masyarakat di sana umumnya bekerja sebagai buruh lepas, yang biasanya ditandai dengan pekerjaan yang tidak tetap, upah harian, serta minimnya jaminan kerja atau tunjangan lain. Ketergantungan masyarakat pada pekerjaan buruh lepas menunjukkan kurangnya opsi pekerjaan yang stabil dan terstruktur, yang berkontribusi pada ketidakpastian pendapatan. Pekerja lepas atau informal sering kali terjebak dalam lingkaran ketidakstabilan ekonomi karena penghasilan yang fluktuatif dan kurangnya kontrak kerja yang jelas.

Sebagai buruh lepas, mayoritas pekerja mungkin tidak mendapatkan akses jaminan kesehatan, tunjangan hari tua, atau asuransi ketenagakerjaan. Hal ini meningkatkan risiko sosial dan ekonomi bagi mereka jika terjadi gangguan kesehatan atau ekonomi mendadak. Tanpa program penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, masyarakat akan kesulitan mengakses pekerjaan tetap yang layak. Hal ini dapat memperbesar kesenjangan sosial, karena akses ke pekerjaan formal biasanya lebih stabil dan mendukung perbaikan ekonomi dalam jangka panjang. Program kerja yang

---

<sup>23</sup> Rudi Ismaini, Wawancara.

terstruktur sering kali menyertakan pelatihan atau pengembangan keterampilan.

Tanpa program seperti ini, pekerja lepas mungkin memiliki peluang terbatas untuk meningkatkan keterampilan, sehingga kesulitan untuk beralih ke pekerjaan yang lebih baik atau bergaji lebih tinggi. Pemerintah dapat membuat program pemberdayaan yang memberikan pelatihan keterampilan, modal usaha, atau akses ke pasar, yang dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat lokal. Program-program ini bisa membantu masyarakat menciptakan usaha sendiri atau meningkatkan kemampuan kerja mereka.

Secara keseluruhan, pernyataan ini menyoroti perlunya kebijakan atau inisiatif untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan adanya program tersebut, masyarakat yang saat ini bekerja sebagai buruh lepas akan memiliki peluang lebih baik untuk memperoleh pekerjaan yang lebih aman, stabil, dan memiliki jaminan sosial yang memadai.

Menurut Nugroho & Widjaja yang menekankan bahwa pekerja di sektor informal jarang mendapatkan akses pada jaminan sosial atau tunjangan lainnya, dan karena itu, mereka rentan menghadapi krisis ekonomi akibat minimnya stabilitas pendapatan. Mereka menemukan bahwa program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha, dapat memberikan alternatif pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Selain itu, program

penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan bukan hanya berpotensi meningkatkan keterampilan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk masuk ke dalam sektor kerja formal yang lebih terjamin<sup>24</sup>.

Analisis hasil penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan kesejahteraan di Desa Bumi Nabung Baru dan Bumi Nabung Ilir, dengan indikator perbedaan kualitas hunian dan penciptaan lapangan kerja. Secara umum, teori kesejahteraan mencakup standar hidup yang baik, termasuk akses pada kebutuhan dasar seperti perumahan, kesehatan, dan pendidikan, sebagaimana dipaparkan oleh Sadono Sukirno yang melihat kesejahteraan melalui pencapaian standar hidup yang layak dan pemerataan dalam distribusi pendapatan.

Di Bumi Nabung Baru, adanya rumah-rumah yang belum layak huni menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori Sadono Sukirno bahwa kesejahteraan harus disertai dengan pemerataan fasilitas. Selain itu, konsep kesejahteraan dalam Islam yang menggarisbawahi kesejahteraan material dan non-material juga relevan di sini, di mana kesejahteraan material tidak terpenuhi bagi warga yang hidup dengan hunian yang tidak layak.

Sedangkan di Bumi Nabung Ilir, program bedah rumah telah memungkinkan masyarakat untuk mencapai standar hunian yang lebih

---

<sup>24</sup> Nugroho, S dan Widjaja, H, "Ketimpangan Sosial dan Akses Tenaga Kerja di Sektor Informal," *Jurnal Sosial* 15, no. 2 (2018): 80–90.

baik, meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketimpangan sosial. Hal ini juga mendukung aspek keadilan dalam penciptaan lapangan kerja, sebagaimana ditegaskan oleh Sri Edi Swasono, yang mendorong pemerataan kesempatan ekonomi agar masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yang merata.

Dari sisi penciptaan lapangan kerja, keterbatasan program di Bumi Nabung mengakibatkan banyak warga bekerja sebagai buruh lepas dengan ketidakpastian pendapatan, yang meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi. Dengan adanya pekerjaan yang stabil dan terstruktur, masyarakat akan lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai kesejahteraan yang lebih mapan.

### **3. Deskripsi Tentang Adopsi Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah**

Adopsi Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan yang berlandaskan hukum syariah dalam berbagai aspek ekonomi modern, seperti perbankan, investasi, asuransi, dan pasar modal. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi dengan menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi berlebihan)<sup>25</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa masyarakat di Kecamatan Bumi Nabung belum terdapat praktik ekonomi dan keuangan

---

<sup>25</sup> Antonio, M. S., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hal 45-50.

syariah, masih banyak masyarakat yang meminjam uang melalui Bank Mekar atau rentenir dengan Bunga tinggi.

“...banyak masyarakat yang pinjam uang dengan bank mekar, bahkan ada yang samapi kabur...”<sup>26</sup>

“...banyak masyarakat yang pinjam uang sama bank medan yang keliling itu, semacam kayak rentenir...”<sup>27</sup>

Hasil wawancara diatas mencerminkan fenomena penggunaan layanan keuangan oleh masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses ke perbankan formal atau sedang mengalami kesulitan ekonomi. Pernyataan wawancara menunjukkan bahwa banyak warga yang tergantung pada pinjaman dari Bank Mekar. Bank Mekar (biasanya dikenal dengan nama PT PNM Mekar) merupakan lembaga keuangan mikro yang fokus membantu UMKM, khususnya untuk perempuan, melalui program pinjaman mikro. Namun, sering kali, pinjaman yang diberikan memiliki beban pembayaran yang cukup besar bagi beberapa peminjam. Dalam situasi sulit, ada kemungkinan peminjam mengalami kesulitan melunasi utang, hingga akhirnya terpaksa menghindari tanggung jawab tersebut dengan kabur.

Ada beberapa alasan yang bisa menyebabkan hal ini, seperti kurangnya pemahaman dalam pengelolaan utang atau kurangnya pendapatan stabil untuk mencicil utang. Hal ini menimbulkan risiko ketidakmampuan membayar kembali pinjaman yang, pada gilirannya, menyebabkan stres finansial bagi peminjam.

---

<sup>26</sup> Nurhadi, Wawancara, 14 Maret 2024.

<sup>27</sup> Samini, Wawancara, Mei 2024.

Pernyataan pada kutipan wawancara kedua mengarah pada bentuk pinjaman tidak resmi yang beredar di masyarakat. Praktik ini sering disebut sebagai "bank gelap" atau rentenir, di mana pemberi pinjaman menawarkan uang secara langsung tanpa prosedur yang rumit tetapi dengan bunga tinggi. Rentenir umumnya menawarkan proses cepat dan syarat yang sederhana, namun bunga yang dibebankan sering kali tidak terjangkau. Rentenir menarik banyak peminjam dari kalangan yang membutuhkan dana mendesak atau yang tidak memenuhi persyaratan bank formal. Namun, tingginya bunga menyebabkan peminjam terjebak dalam siklus utang, di mana mereka kesulitan melunasi pinjaman dan justru terus menambah pinjaman baru untuk membayar utang lama, yang pada akhirnya dapat mengarah pada krisis keuangan pribadi.

Fenomena ini mencerminkan pentingnya dukungan sistem keuangan berbasis syariah serta pengawasan terhadap praktik pinjaman tidak resmi yang rentan memberatkan masyarakat kecil.

Menurut penelitian Fadila & Suryanto, pinjaman dari rentenir memiliki daya tarik karena prosedur yang sederhana dan pencairan dana yang cepat. Namun, bunga yang tinggi pada pinjaman ini membuat peminjam sulit melunasi pinjaman tanpa menambah utang baru, yang akhirnya membawa mereka dalam siklus utang<sup>28</sup>.

Penelitian ini menggambarkan kondisi di Kecamatan Bumi Nabung, di mana sebagian masyarakat memanfaatkan layanan pinjaman

---

<sup>28</sup> Fadila, R dan Suryanto, H, "Dampak Sosial Ekonomi dari Praktik Rentenir di Masyarakat Pedesaan" 15, no. 2 (2020): 120–130.



berbunga tinggi dari lembaga non-syariah seperti Bank Mekar atau bahkan rentenir. Kondisi ini berpotensi memberatkan masyarakat secara finansial, karena mereka terjebak dalam siklus utang akibat bunga tinggi dan sulitnya akses ke perbankan formal.

Menurut teori ekonomi syariah, praktik-praktik keuangan seperti ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menghindari riba (bunga), spekulasi, dan ketidakpastian. Sistem keuangan syariah menekankan pada keadilan dan kesejahteraan, sehingga pelarangan bunga bertujuan untuk menghindarkan masyarakat dari beban finansial berlebih dan menjaga inklusi keuangan yang adil. Sejalan dengan teori ini, ekonomi syariah menawarkan solusi alternatif melalui koperasi syariah atau produk-produk pembiayaan berbasis syariah lainnya, yang memberikan pinjaman tanpa bunga dan mengutamakan pembagian keuntungan secara adil.

Penggunaan praktik keuangan syariah juga dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mekanisme seperti zakat, infak, dan wakaf, yang membantu distribusi kekayaan secara lebih merata. Selain itu, etika bisnis syariah mendorong tanggung jawab sosial dan prinsip keadilan dalam transaksi, yang penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

### **C. Hambatan dan Tantangan dalam Mengukur Indikator Pembangunan Ekonomi Islam pada Masyarakat Pedesaan**

Mengukur indikator pembangunan ekonomi Islam di masyarakat pedesaan menghadapi beberapa hambatan dan tantangan utama yang dapat dianalisis melalui teori dari buku dan jurnal. Berikut adalah beberapa tantangan dalam mengukur indikator pembangunan ekonomi Islam pada masyarakat pada masyarakat pedesaan:

1. Kerangka Indikator yang Belum Kompleks dan Belum Seragam

Salah satu tantangan besar dalam mengukur pembangunan ekonomi Islam adalah kurangnya standar yang seragam dalam indikator yang digunakan. Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip unik seperti keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan yang bersifat material maupun spiritual. Namun, penerapan dan pengukuran indikator-indikator ini di masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan data seringkali sulit dilakukan. Menurut Chapra, pembangunan ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pendapatan, tetapi juga aspek seperti distribusi kekayaan yang adil dan kesejahteraan spiritual masyarakat, yang sulit diukur dengan metode konvensional seperti PDB atau indeks kemiskinan saja. Chapra juga menekankan bahwa indikator pembangunan dalam ekonomi Islam harus mempertimbangkan tujuan syariah, yang meliputi perlindungan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta.<sup>29</sup>

2. Keterbatasan Data dan Infrastruktur

Banyak wilayah pedesaan, terdapat kendala dalam pengumpulan data yang akurat dan berkelanjutan. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan

---

<sup>29</sup> Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, hal 215.

akses teknologi dan keterbatasan dalam kemampuan pengumpulan data, sehingga mengukur indikator ekonomi Islam menjadi sulit. Menurut Asutay, masyarakat pedesaan umumnya tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan, yang menghambat evaluasi perkembangan indikator pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>30</sup>

### 3. Kurangnya Dukungan Kebijakan dan Kesadaran Pemerintah Daerah

Dukungan dari pemerintah lokal yang sering kali rendah juga menjadi tantangan besar. Pemerintah di tingkat desa atau kabupaten mungkin belum memahami secara mendalam pentingnya indikator pembangunan ekonomi Islam. Hal ini berdampak pada kurangnya kebijakan yang mendukung pengembangan indikator berbasis Islam. Hal ini disorot oleh Sri Edi Swasono, yang mencatat bahwa untuk mencapai pembangunan ekonomi yang adil, pemerintah harus berperan aktif dalam mendorong distribusi sumber daya secara merata dan melibatkan semua elemen masyarakat, terutama di pedesaan.<sup>31</sup>

### 4. Perbedaan Nilai dan Pandangan di Kalangan Masyarakat

Masyarakat pedesaan sering kali memiliki pandangan yang berbeda tentang pembangunan ekonomi, terutama terkait dengan konsep keadilan, pemerataan, dan kekayaan. Sebagian masyarakat mungkin lebih fokus pada peningkatan pendapatan daripada pada distribusi kekayaan atau

---

<sup>30</sup> Asutay, M, "Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs. the Realities of Islamic Finance.," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 8, no. 2 (2012): 309.

<sup>31</sup> Sri Edi Swasono, *Keadilan Ekonomi: Dari Perspektif Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: LP3ES, 2014), hal 87.

pembangunan berkelanjutan. Ini menjadi tantangan untuk mengintegrasikan pandangan Islam dalam indikator pembangunan ekonomi. Menurut Kuncoro, pendekatan berbasis budaya dan agama memerlukan usaha lebih dalam pengenalan konsep keadilan ekonomi Islam di tingkat masyarakat pedesaan yang masih tradisional.<sup>32</sup>

#### 5. Keterbatasan Lembaga Keuangan Syariah.

Pembangunan ekonomi Islam di masyarakat pedesaan juga menghadapi hambatan berupa kurangnya lembaga keuangan syariah. Hal ini menyebabkan masyarakat pedesaan sering kali bergantung pada lembaga keuangan konvensional yang kurang mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba. Menurut Khan dan Bashar, salah satu hambatan utama di pedesaan adalah tidak tersedianya lembaga keuangan syariah yang dapat mendukung usaha mikro dan kecil sesuai dengan prinsip syariah.<sup>33</sup>

Secara keseluruhan, tantangan dalam mengukur indikator pembangunan ekonomi Islam di masyarakat pedesaan mencakup masalah standar indikator yang belum seragam, keterbatasan data dan infrastruktur, kurangnya dukungan kebijakan, perbedaan nilai-nilai masyarakat, dan keterbatasan lembaga keuangan syariah. Hambatan ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan syariah untuk memastikan indikator pembangunan ekonomi Islam dapat diterapkan dan diukur secara efektif.

---

<sup>32</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, hal 101.

<sup>33</sup> Khan, M. F. dan Bashar, O. H, *Theoretical Foundations of Islamic Economics* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008), hal 35-59.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti laksanakan dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator pertama, keadilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan hanya terimplementasi dua (2) aspek, yaitu: aspek lingkungan yang dipertahankan dan aspek partisipasi masyarakat. Indikator kedua, kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja sudah terimplementasi aspek pertama, yaitu kesejahteraan. Adapun indikator yang belum terimplementasi di Kecamatan Bumi Nabung adalah indikator pertama, keadilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan masih belum terlaksana dua (2) aspek, yaitu: aspek keadilan sosial dan ekonomi serta aspek kualitas hidup yang meningkat. Indikator kedua, kesejahteraan dan penciptaan kerja belum telaksana aspek kedua, yaitu: penciptaan lapangan kerja. Dan indikator ketiga, praktik ekonomi dan keuangan Islam belum terimplementasi di Kecamatan Bumi Nabung.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan diatas. Maka diperoleh saran terhadap penelitian ini yaitu kepada:

##### **1. Bagi Pemerintah**

Dalam upaya pembangunan ekonomi Islam diharapkan aparatur di Kecamatan Bumi Nabung baik aparatur desa maupun aparatur

kecamatan dapat merealisasikan program-program pembangunan sebaik mungkin, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Kurangnya perhatian pemerintah dengan lingkungan sekitar dapat memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan pertanian, karena dengan adanya gotong royong rutin dapat meminimalisir masuknya sampah-sampah plastik yang sulit terurai masuk kedalam lahan pertanian khususnya lahan persawahan.

Disamping itu juga, kurangnya pemabaharuan sistem pendataan masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu dapat mempengaruhi keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dengan tidak adanya pendataan ulang maka dapat dipastikan yang akan mendapatkan bantuan sosial dan ekonomi hanyalah orang-orang tertentu saja. Diharapkan pula dengan adanya pendataan ulang masyarakat yang belum terdata segera mendapatkan bantuan sosial dan ekonomi yang layak dan adil.

## 2. Bagi Penelitian selanjutnya

- a. Penelitian ini fokus pada indikator-indikator pembangunan ekonomi Islam di Kecamatan Bumi Nabung. Berdasarkan hasil penelitian hanya beberapa indikator pembangunan ekonomi Islam yang terimplementasi di Kec. Bumi Nabung namun sayangnya indikator yang terimplementasi tidak berjalan secara menyeluruh pada setiap desa-desa di Kec. Bumi Nabung. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan melihat

indikator pembangunan ekonomia Islam bukan hanya dari sudut pandang eksternal objek penelitian tapi juga dari sudut pandang internal yaitu aparatur pemerintahan di Kecamatan Bumi Nabung.

- b. Objek penelitian ini masih sangat terbatas, yaitu melihat dari dua desa di Kecamatan Bumi Nabung. Oleh karena itu diharapkan peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian dengan melibatkan objek penelitian yang lebih luas.
- c. Diharapkan dapat menemukan indikator-indikator pembangunan ekonomi Islam lainnya sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir bagi para akademisi pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Jajang w. Mahri dan dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. 1 ed. 1. Jakarta: Departement Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021.
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Islam Mikro dan Makro*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Afifah Rangkuti. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." *TAZKIYA VI*, no. 1 (2017): 3.
- Ali Rama. *Kontrusi Indeks Keislaman Ekonomi dan Kajian Empirisnya di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Bisnis Islam, 2016.
- Antonio, M. S. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aryanti Arfah dan Muhammad Arif. "Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Bekelanjutan dalam Perspektif Islam." *SEIKO: Journal of Management & Business* 4, no. 1 (2021): 566–81.
- Asutay, M. "Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs. the Realities of Islamic Finance." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 8, no. 2 (2012): 309.
- Boediono. *Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah dan Prospek Masa Depan*. Jakarta: Kompas, 2005.
- Chapra Umer. *The Future Of Ecocomics: An Islamic Perspective*. Jakarta: Syari'ah Economics And Banking Institute, 2001.
- Dedi Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Endang Mulyana. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UNY Press, 2017.
- Fadila, R dan Suryanto, H. "Dampak Sosial Ekonomi dari Praktik Rentenir di Masyarakat Pedesaan" 15, no. 2 (2020): 120–30.
- Haqiqi Rafsanjani. *Islamic Human Development Index Di Indonesia*. Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2018.
- Ismail, Hasang dan Muhammad Nur. *Perekonomian Indonesia*. Ahlimedia Book, 2020.
- Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi. *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. 1 ed. Paris: Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2009.
- Joseph Stiglitz. *The Price of Inequality*. New York, Amerika Serikat: W.W. Norton & Company, 2012.



- Khan, M. F. dan Bashar, O. H. *Theoretical Foundations of Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008.
- Kusuma, H dan Wahyudi, A. “Implementasi Program Bedah Rumah sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial” 5, no. 2 (2019): 102–15.
- L. Rahayu dan Suhardjo. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 17, no. 3 (2014): 45–48.
- . “Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15, no. 2 (2012): 88–95.
- Latifa Resmiya dan Ifa H. Misbach. “Pengukuran Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Hidup di Indonesia.” *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling* 3, no. 2 (2017): 23–29.
- M. Umer Chapra. *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*. 21 vol. UK: Kube Publishing Ltd, 2016.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. 10 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Michael P. Tadora dan Stephen Smith. *Economic Development*. 12 ed. Harlow, Inggris: Pearson Education, 2015.
- Miles, M. B. dan Huberman, A. M. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: Sage, 1994.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Pemikiran*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Mudrajad Kuncoro. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Muhajirin dan Maya Panorama. *Pendekatan Praktis; Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Muhammad Hasan dan Muhammad Azis. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal)*. Makassar: CV. NUR LINA & Pustaka Taman Ilmu, 2018.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Muslim Economic Thinking*. Leicester, Inggris.: Islamic Foundation, 1981.
- Mustopa Marli Batubara. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2011.
- N F M Nofitri. “Gambaran Kualitas Hidup Penduduk Dewasa pada Lima Wilayah di Jakarta.” Universitas Indonesia, 2009.

- Nugroho, R. dan Wibisono, E. “Pengaruh Pergantian Kepemimpinan Terhadap Keberlanjutan Program Lingkungan di Desa.” *Jurnal Manajemen Lingkungan* 2, no. 1 (2020): 29–38.
- Nugroho, S dan Widjaja, H. “Ketimpangan Sosial dan Akses Tenaga Kerja di Sektor Informal.” *Jurnal Sosial* 15, no. 2 (2018): 80–90.
- Nurhayati, S. “Studi Aksesibilitas Layanan Kesehatan di Daerah Pedesaan: Tantangan dan Peluang.” Universitas Erlangga, 2019.
- Putri, M. “Distribusi Bantuan dan Dampaknya Terhadap Ketimpangan Ekonomi di Desa.” Universitas Indonesia, 2019.
- Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sri Edi Swasono. *Ekonomi Pancasila dan Sosialisme Religius*. Jakarta: Kompas, 2013.
- . *Keadilan Ekonomi: Dari Perspektif Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: LP3ES, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Suparlan, P. *Kemiskinan di Perkotaan: Suatu Perspektif Antropologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Svetlana, Chesnokova. “Transport In Indonesia: Recent Developemnt Trends.” *Eastern analytics* 4 (2021): 62–73.
- Todaro, M. P. dan Smith, S. C. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. 10 Terjemahan. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Umer Chapra. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester, Inggris.: The Islamic Foundation, 1992.
- Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R. “Kesejahteraan Dalam Prespetif Islam Pada Karyawan Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi Teori dan Terapan* 3, no. 5 (2016): 392–93.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Wawancara dengan Kepala Desa Bumi Nabung Baru



Wawancara dengan aparatur Kecamatan Bumi Nabung



Wawancara dengan masyarakat Desa Bumi Nabung Ilir



Wawancara dengan masyarakat Desa Bumi Nabung Baru



Wawancara dengan masyarakat Desa Bumi Nabung Ilir





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0563/In.28.1/J/TL.00/02/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Yudhistira Ardana (Pembimbing 1)  
Yudhistira Ardana (Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **OKTA ADIONI TINOKAE RAHMA SUCI**  
NPM : 2003011080  
Semester : 8 (Delapan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari`ah  
Judul : **ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM STUDI KASUS PADA MASYARAKAT BUMI NABUNG**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 23 Februari 2024  
Ketua Jurusan,



**Yudhistira Ardana**  
NIP 198906022020121011

**ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM STUDI PADA  
MASYARAKAT BUMI NABUNG  
ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

**A. Wawancara**

No	Indeks	Indikator	Sub Indikator	Butir Pertanyaan
1	Indeks Pencapaian Keadilan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan	a. Mempertahankan keberlanjutan lingkungan.  b. Keadilan sosial dan ekonomi.	a) Mengurangi polusi. b) Kerusakan habitat. c) Degradasi SDA  a) Adil secara manfaat. b) Memperkecil kesenjangan. c) Kesempatan yang sama.	1. Bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi polusi (air, udara, tanah, dan suara) di Bumi Nabung? 2. Bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kelestarian habitat yang ada di Bumi Nabung? 3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengurangi degradasi SDA yang di Bumi Nabung?  1. Bagaimana pembagian bantuan sosial terhadap masyarakat diberikan secara merata khususnya terhadap masyarakat yang tidak mampu? 2. Apa saja kebijakan pemerintah untuk memperkecil kesenjangan (sosial dan ekonomi) pada masyarakat Bumi Nabung?

				3. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Bumi Nabung?
		c. Kualitas hidup meningkat.	a) Akses pendidikan b) Kesehatan c) Infrastruktur d) Kebutuhan dasar lain	1. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat Bumi Nabung? 2. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan akses kesehatan kepada masyarakat Bumi Nabung? 3. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan akses infrastruktur kepada masyarakat Bumi Nabung? 4. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan akses kebutuhan dasar lain (air, listrik, dan lain-lain) pada masyarakat Bumi Nabung?
		d. Partisipasi masyarakat.	a) Pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan	1. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam kebijakan pembangunan ekonomi di Kecamatan Bumi Nabung 2. Dalam bentuk apa partisipasi yang diberikan masyarakat?
2	Kesejahteraan	a. Kesejahteraan.	a) Kesejahteraan pendidikan	1. Bagaimana pemerintah memberikan bantuan pendidik pada masyarakat Bumi Nabung?

.	dan Penciptaan Lapangan Kerja		<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Kesehatan.</li> <li>c) Rumah yang layak.</li> <li>d) Sosial dan ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Bagaimana pemerintah memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat Bumi Nabung?</li> <li>3. Bagaimana pemerintah memberikan bantuan pangan yang cukup bagi masyarakat yang tidak mampu?</li> <li>4. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan sosial di Bumi Nabung?</li> <li>5. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat di Bumi Nabung?</li> </ul>
		b. Penciptaan lapangan kerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penciptaan lapangan kerja.</li> <li>b) Memberikan pelatihan kerja.</li> <li>c) Mengurangi pengangguran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengurangi pengangguran di Bumi Nabung?</li> <li>2. Apa saja lapangan kerja yang diberikann pemerintah bagi masyarakat di Bumi Nabung?</li> <li>3. Apakah pemerintah memberikan pelatihan kerja bagi masyarakat yang menganggur di Bumi Nabung, dalam benruk apa?</li> </ul>
3	Adopsi Praktik Ekonomi dan Keuangan Islam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem keuangan berbasis syariah.</li> <li>b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.</li> <li>c. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah di Bumi Nabung masih terdapat praktik pinjam uang dengan bunga yang tinggi?</li> </ul>

**ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM STUDI KASUS  
PADA MASYARAKAT BUMI NABUNG**

***OUTLINE***

**HALAMAN SAMPUL DEPAN  
HALAMAN JUDUL  
HALAMAN ABSTRAK  
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING  
HALAMAN PENGESAHAN  
ORISINALITAS PENELITIAN  
MOTTO  
HALAMAN PERSEMBAHAN  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- E. Latar Belakang Masalah**
- F. Pertanyaan Penelitian**
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
- H. Penelitian Relevan**

**BAB II LANDASAN TEORI**

- C. Pembangunan Ekonomi Islam**
  - 4. Pengertian Pembangunan Ekonomi**
  - 5. Tujuan Pembangunan Ekonomi**
  - 6. Manfaat Pembangunan Ekonomi**
- D. Indikator Pembangunan Ekonomi Islam**
  - 8. Indeks Pencapaian Keadilan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan**
  - 9. Kesejahteraan dan Penciptaan Lapangan Kerja**
  - 10. Adopsi Praktik Ekonomi dan Keuangan Islam**

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- F. Jenis dan Sifat Penelitian**
- G. Sumber Data**
  - 4. Sumber Data Primer**

- 5. Sumber Data Sekunder
- 6. Sempling
- H. Teknik Pengumpulan Data
  - 4. Wawancara
  - 5. Dokumentasi
- I. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- J. Teknik Analisis Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- D. Gambaran Kecamatan Bumi Nabung
- E. Indikator Pembangunan Ekonomi Islam Pada Masyarakat Bumi Nabung
  - 4. Indeks Pencapaian Keadilan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan
  - 5. Kesejahteraan dan Penciptaan Lapangan Kerja
  - 6. Adopsi Praktik Ekonomi dan Keuangan Islam
- F. Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Bumi Nabung

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- C. Kesimpulan
- D. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing Skripsi



Yudhistira Ardana, M.E.K.  
NIP. 198906022020121011

Metro, Februari 2024  
Peneliti



Okta Adfoni Tinokae Rahma Suci  
NPM. 2003011080



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM




Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Okta Adioni Tinokae Rahma Suci Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy

NPM : 2003011080

Semester/TA : VIII (Delapan)/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa 14 Mei 2024	* tambahkan analisis pada pembahasan * perbaiki simpulan & Saran (dibuat per point) + perbaiki narasi abstrak	 
2	Selasa 21/05/2024	ACC Munagasyah	

Dosen Pembimbing,

  
Yudhiswira Ardana, M.E.K  
NIP. 198906022020121011

Mahasiswa Ybs,

  
Okta Adioni Tinokae Rahma Suci  
NPM. 2003011080





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0612/In.28/D.1/TL.00/02/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PIMPINAN KECAMATAN BUMI  
NABUNG  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0613/In.28/D.1/TL.01/02/2024,  
tanggal 26 Februari 2024 atas nama saudara:

Nama : **OKTA ADIONI TINOKAE RAHMA SUCI**  
NPM : 2003011080  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PIMPINAN KECAMATAN BUMI NABUNG bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KECAMATAN BUMI NABUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM STUDI PADA MASYARAKAT BUMI NABUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 26 Februari 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN BUMI NABUNG

Jl. Abung Kiwah No.01 Bumi Nabung Ilir Kode Post 34168  
[Email.kecamatanbuminabung@gmail.com](mailto:Email.kecamatanbuminabung@gmail.com)

Bumi Nabung Ilir, 29 Pebruari 2024


Nomor : 430/032/Kc.a.VIII.24/2024  
Sifat : biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Research

Yth. Dekan IAIN Metro  
Di -  
Tempat

Menindaklanjuti surat saudara Nomor: B-016/In.28/D.1/TL/00/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 hal izin research Mahasiswi Atas Nama OKTA ADIONI TINOKAE RAHMA SUCI, NPM 2003011080, Jurusan Ekonomi Syariah Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan menyetujui untuk melakukan Riset di wilayah Kecamatan Bumi Nabung.

Demikian untuk menjadi maklum.

CAMAT BUMI NABUNG

  
ACHMAD HERY SETIAWAN, SE.,MM  
Pembina/ IV.a  
NIP.1978122320064 1 00 3



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0613/In.28/D.1/TL.01/02/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : OKTA ADIONI TINOKAE RAHMA SUCI  
NPM : 2003011080  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KECAMATAN BUMI NABUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM STUDI PADA MASYARAKAT BUMI NABUNG".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 26 Februari 2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF  
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.ain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.ain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-339/In.28/S/U.1/OT.01/05/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : OKTA ADIONI TINOKAE RAHMA SUCI  
NPM : 2003011080  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2003011080

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 21 Mei 2024  
Kepala Perpustakaan

Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Okta Adioni Tinokae Rahma Suci  
NPM : 2003011080  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Pembangunan Ekonomi Islam Studi Kasus Pada Masyarakat Bumi Nabung** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 21%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Juli 2024  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



**Yudhistira Ardana, M.E.K.**  
NIP.198906022020121011

## RIWAYAT HIDUP



Okta Adioni Tinokae Rahma Suci dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 22 Oktober 2002, Peneliti merupakan putri ketiga dari pasangan Bapak Endang KR dan Ibu Samini. Bertempat tinggal di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. SD N 01 Bumi Nabung Baru, lulus pada tahun 2013
2. MTs Al-Muhsin Metro, lulus pada tahun 2016
3. MA Al-Muhsin Metro, lulus pada tahun 2019

Kemudian pada tahun 2020 peneliti melanjutkan study di IAIN Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah. Pada akhir masa study, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: **“Implementasi Indikator Pembangunan Ekonomi Islam Studi Kasus Pada Masyarakat Bumi Nabung Kabupaten Lampung”**